

MONOGRAF



MANAJEMEN KEUANGAN, PEMAHAMAN TEKNOLOGI, DAN PERAN PEMERINTAH

dalam Membentuk KINERJA UMKM

Rahmat Hidayat, S.E., M.M



PERAN PEMERINTAH



**MANAJEMEN
KEUANGAN**

Perencanaan, pencatatan,
pengendalian, dan analisis
keuangan



**PEMAHAMAN
TEKNOLOGI**

Adopsi teknologi untuk
efisiensi, inovasi, dan
daya saing



PERAN PEMERINTAH

Kebijakan, pembiayaan,
pelatihan, pendampingan,
infrastruktur, dan akses pasar



KINERJA UMKM

Produktivitas, profitabilitas,
dan pertumbuhan
berkelanjutan

MONOGRAF

Rahmat Hidayat, S.E., M.M

MANAJEMEN KEUANGAN, PEMAHAMAN TEKNOLOGI, DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK KINERJA UMKM

Diterbitkan Oleh:



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

HAK CIPTA

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**MANAJEMEN KEUANGAN, PEMAHAMAN
TEKNOLOGI, DAN PERAN PEMERINTAH
DALAM MEMBENTUK KINERJA UMKM**

Penulis: Rahmat Hidayat, S.E., M.M

Editor : Dr Sulaiman Teddu, M.Si

**Penerbit:
Tomakaka Press**

**Jl. Ir. H. Juanda No. 77/44, Kabupaten Mamuju,
Gedung LPPM Universitas Tomakaka 91511**

Website: <https://tomakakapress.com/tput>

Email: lp2mutomakaka@gmail.com

Cetakan Pertama, Bulan Agustus, Tahun 2026

xii + 193 hal : 15 x 23 cm

ISBN Digital: 978-634-05-5557-8

Distribusikan Oleh:
Tomakaka Press

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga monograf yang berjudul “Manajemen Keuangan, Pemahaman Teknologi, Dan Peran Pemerintah Dalam Membentuk Kinerja UMKM” dapat diselesaikan dengan baik.

Monograf ini disusun sebagai salah satu bentuk kontribusi akademik dalam memperkaya literatur mengenai pengelolaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, dinamika lingkungan usaha, serta perubahan kebutuhan pengelolaan usaha yang semakin kompleks.

Pembahasan dalam monograf ini tidak disusun sebagai laporan penelitian atau dokumen administratif suatu kegiatan, tetapi dikembangkan menjadi bahan bacaan akademik yang mengintegrasikan konsep, teori, hasil kajian empiris, serta pembahasan mengenai praktik pengelolaan UMKM. Materi disusun secara sistematis agar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pembaca dari berbagai latar belakang.

Monograf ini membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan kinerja UMKM, meliputi konsep kinerja UMKM, manajemen keuangan, pemanfaatan teknologi, transformasi digital, serta peran pemerintah dalam mendukung penguatan kapasitas dan keberlanjutan UMKM. Pembahasan tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perkembangan UMKM.

Buku ini ditujukan sebagai bahan referensi dan bacaan bagi mahasiswa, dosen, peneliti, pelaku UMKM, praktisi, pendamping usaha, lembaga keuangan, pemerintah daerah, pengambil kebijakan, serta masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap pengembangan UMKM. Monograf ini diterbitkan untuk dapat diakses dan dimanfaatkan secara lebih luas sebagai bagian dari kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan dan praktik pengelolaan UMKM.

Penulis menyadari bahwa monograf ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan karya ini pada masa mendatang.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyusunan monograf ini. Semoga monograf ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan UMKM serta memberikan kontribusi bagi penguatan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Indonesia.

Mamuju, Agustus 2026
Penulis

Rahmat Hidayat, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

PRAKATA	5
DAFTAR ISI	7
DAFTAR GAMBAR	10
DAFTAR TABEL	11
BAB 1 Mengenal UMKM dan Tantangannya.....	12
A. UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi. Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	
B. Kondisi UMKM Indonesia	17
C. Kondisi Ekonomi dan UMKM Sulawesi Barat .	20
BAB 2 Konsep Kinerja UMKM	28
A. Definisi UMKM	28
B. Perkembangan UMKM Indonesia	32
C. Indikator Kinerja UMKM.....	36
D. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja UMKM.....	38
E. Tantangan UMKM Di Era Digital	42
BAB 3 Manajemen Keuangan UMKM.....	46
A. Konsep Dasar Manejemen Keuangan Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.	

- B. Perencanaan Keuangan Usaha **Kesalahan!
Bookmark tidak ditentukan.**
- C. Penganggaran, Arus Kas dan Laporan Keuangan
 Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
- D. Pengambilan Keputusan Keuangan..... 57

BAB 4 Pemanfaatan Teknologi Untuk Pengembangan UMKM..... 61

- A. Transformasi Digital UMKM..... **Kesalahan!
Bookmark tidak ditentukan.**
- B. Konsep Financial Technology (FinTech)..... 77
- C. Konsep Marketplace dan Pemasaran Digital 83

BAB 5 Peran Pemerintah Dalam Penguatan Kinerja UMKM..... 90

- A. Kebijakan UMKM..... 90
- B. Bantuan Pemerintah..... 93
- C. Inkubasi Bisnis 97
- D. Digitalisasi UMKM 101
- E. Pembiayaan UMKM..... 105

BAB 6 Praktik Manajemen Keuangan UMKM di Sulawesi Barat..... 108

A. Dinamika Perkembangan UMKM di Sulawesi Barat	108
B. Praktik Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Sulawesi Barat	113
C. Transformasi Digital dalam Praktik Manajemen Keuangan UMKM.....	122
D. Peran Pemerintah dalam Memperkuat Praktik Manajemen Keuangan UMKM.....	128
E. Sintesis Kajian Empiris tentang Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja UMKM di Sulawesi Barat	133
BAB 7 Potret UMKM Sulawesi Barat Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah.....	151
A. Studi Kasus Digitalisasi UMKM di Sulawesi Barat	158
B. Studi Kasus Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM	164
C. Sintesis Pembelajaran Berdasarkan Kajian Empiris UMKM di Sulawesi Barat	167
BAB 8 Strategi Penguatan UMKM.....	174
A. Pendahuluan	174

B. Strategi Penguatan Manajemen Keuangan UMKM.....	178
Daftar Pustaka.....	185
BIODATA PENULIS	191

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perkembangan Jumlah UMKM Indonesia Tahun 2020-2024	17
Gambar 2 PDRB Per Kapita Sulawesi Barat Tahun 2023– 2025	21
Gambar 3 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2023–2025	23
Gambar 4 Pertumbuhan Lapangan Usaha Sulawesi Barat Tahun 2025.....	25
Gambar 5 Model Inkubasi Bisnis Terintegrasi bagi UMKM.....	100
Gambar 6 Model Digitalisasi UMKM.....	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Temuan Manajemen Keuangan UMKM di Sulawesi Barat.....	119
Tabel 2	Ringkasan Temuan Pemanfaatan Teknologi pada UMKM.....	125
Tabel 3	Ringkasan Temuan Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM	130
Tabel 4	Implikasi Praktis bagi Pelaku UMKM dan Pemerintah.....	149
Tabel 5	Strategi Penguatan Manajemen Keuangan UMKM.....	184

BAB

1

Mengenai UMKM dan Tantangannya

A. UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian di berbagai negara, terutama negara berkembang. Kontribusi UMKM tidak hanya tercermin pada kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi tingkat kemiskinan, tetapi juga dalam memperkuat struktur ekonomi nasional melalui pemerataan aktivitas ekonomi dan pemberdayaan sumber daya lokal. Di Indonesia, UMKM memiliki peran yang sangat penting karena mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja serta menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM telah menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (2023) menjelaskan bahwa UMKM merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif, inovasi, dan penciptaan lapangan kerja. Sejalan dengan itu, World Bank (2024) menegaskan bahwa penguatan kapasitas UMKM menjadi faktor penting dalam meningkatkan

produktivitas, daya saing, dan ketahanan ekonomi suatu negara.

Meskipun memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan lingkungan bisnis global. Perkembangan teknologi digital, meningkatnya persaingan usaha, perubahan perilaku konsumen, integrasi pasar, serta ketidakpastian ekonomi menuntut pelaku UMKM untuk mampu beradaptasi secara cepat. Keunggulan kompetitif tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya modal usaha, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan secara efektif, memanfaatkan teknologi digital, serta memperoleh dukungan kebijakan yang mampu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Oleh karena itu, peningkatan daya saing UMKM memerlukan sinergi antara kapasitas internal pelaku usaha dan dukungan eksternal dari pemerintah sebagai regulator sekaligus fasilitator pembangunan ekonomi.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan UMKM adalah manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha menyusun perencanaan keuangan, mengendalikan arus kas, mengelola modal kerja, menyusun laporan keuangan, serta mengambil keputusan investasi secara rasional. Kemampuan tersebut akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan memperkuat keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Brigham dan Houston (2022) menyatakan bahwa manajemen keuangan yang

efektif menjadi dasar dalam menciptakan nilai perusahaan melalui pengambilan keputusan keuangan yang tepat. Pada konteks UMKM, pengelolaan keuangan yang baik juga meningkatkan kemampuan usaha dalam memperoleh akses pembiayaan dan memperluas peluang pengembangan bisnis.

Selain manajemen keuangan, pemahaman teknologi telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan UMKM pada era transformasi digital. Pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi pencatatan keuangan digital, sistem pembayaran elektronik, e-commerce, media sosial, hingga teknologi pemasaran digital memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, memperbaiki kualitas layanan, serta meningkatkan daya saing. Digitalisasi juga membuka peluang bagi UMKM untuk mengakses pasar nasional maupun global dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan metode pemasaran konvensional. Oleh karena itu, tingkat pemahaman teknologi menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kemampuan UMKM menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis.

Di samping faktor internal tersebut, peran pemerintah memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator yang menyusun kebijakan dan regulasi usaha, tetapi juga sebagai fasilitator yang

menyediakan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, digitalisasi UMKM, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, sertifikasi produk, serta perluasan akses pasar. Melalui berbagai program pemberdayaan, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM sehingga mampu berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memperkuat kebijakan tersebut melalui penyediaan kemudahan perizinan, akses pembiayaan, pengembangan kemitraan, serta dukungan transformasi digital bagi UMKM.

Walaupun berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak UMKM yang menghadapi berbagai kendala dalam mengelola usahanya. Sebagian pelaku usaha belum mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar, belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal, serta masih mengalami keterbatasan dalam memperoleh akses pembiayaan, pendampingan, maupun informasi pasar. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas dan daya saing UMKM belum berkembang secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kinerja UMKM memerlukan pendekatan

yang komprehensif melalui penguatan manajemen keuangan, peningkatan pemahaman teknologi, serta optimalisasi peran pemerintah dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara Manajemen Keuangan, Pemahaman Teknologi, Dan Peran Pemerintah Dalam Membentuk Kinerja UMKM. Ketiga faktor tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, inovasi, dan daya saing usaha. Manajemen keuangan memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang efektif, pemahaman teknologi mendorong peningkatan efisiensi serta perluasan pasar, sedangkan peran pemerintah memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui kebijakan, fasilitasi, pembinaan, dan pemberdayaan. Sinergi ketiga aspek tersebut diharapkan mampu menciptakan UMKM yang tangguh, adaptif, inovatif, dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

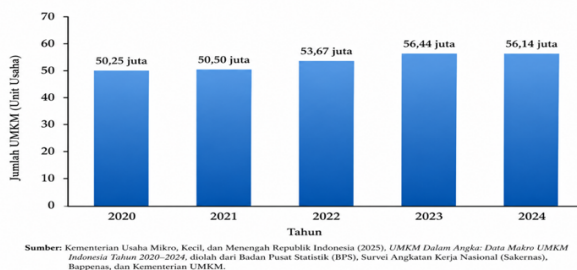
Atas dasar pemikiran tersebut, buku ini disusun untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana manajemen keuangan, pemahaman teknologi, dan peran pemerintah berkontribusi dalam membentuk kinerja UMKM. Pembahasan tidak hanya difokuskan pada aspek konseptual, tetapi juga

dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian empiris, analisis kondisi UMKM di Indonesia, serta implikasi praktis yang dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, pemerintah, dan pelaku UMKM dalam merumuskan strategi pengembangan usaha yang lebih efektif dan berkelanjutan.

B. Kondisi UMKM Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan masyarakat. Peran strategis tersebut menjadikan UMKM sebagai sektor yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional, terutama ketika menghadapi berbagai dinamika ekonomi global maupun domestik. Oleh karena itu, perkembangan jumlah UMKM menjadi salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika aktivitas ekonomi masyarakat dan tingkat kewirausahaan di Indonesia

Gambar 1 Perkembangan Jumlah UMKM Indonesia Tahun 2020-2024



Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (2025), jumlah UMKM nasional selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif meningkat. Pada tahun 2020 jumlah UMKM tercatat sebanyak 50,25 juta unit usaha, kemudian meningkat menjadi 50,50 juta unit usaha pada tahun 2021. Pertumbuhan yang lebih tinggi terjadi pada tahun 2022 dengan jumlah UMKM mencapai 53,67 juta unit usaha, dan kembali meningkat menjadi 56,44 juta unit usaha pada tahun 2023. Meskipun pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 56,14 juta unit usaha, jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa UMKM merupakan kelompok pelaku usaha terbesar di Indonesia dan memiliki peran yang sangat dominan dalam menopang aktivitas ekonomi nasional.

Peningkatan jumlah UMKM tersebut menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat untuk berwirausaha serta semakin besarnya kontribusi sektor usaha skala mikro, kecil, dan menengah terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha tidak hanya mencerminkan bertambahnya unit usaha baru, tetapi juga menggambarkan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi secara mandiri. Kondisi ini menjadi modal penting dalam memperkuat struktur ekonomi nasional karena UMKM tersebar hampir di seluruh sektor usaha, mulai dari pertanian, perdagangan, industri pengolahan, jasa, hingga ekonomi kreatif.

Namun demikian, peningkatan jumlah UMKM belum selalu diikuti oleh peningkatan kualitas dan kinerja usaha. Sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya, seperti keterbatasan kemampuan dalam mengelola keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta belum optimalnya penerapan Peran Pemerintah. Tidak sedikit UMKM yang masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, belum memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha, memiliki keterbatasan dalam memanfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, dan belum menerapkan sistem pengelolaan usaha yang profesional. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian UMKM mengalami kesulitan dalam meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, maupun memperoleh akses terhadap pembiayaan formal.

Dalam era transformasi digital dan persaingan usaha yang semakin kompetitif, keberhasilan UMKM tidak lagi hanya ditentukan oleh banyaknya jumlah pelaku usaha, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya secara efektif. Manajemen keuangan menjadi fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan usaha melalui pengelolaan arus kas, penyusunan anggaran, pengendalian biaya, serta pengambilan keputusan investasi yang tepat. Di sisi lain, pemahaman teknologi menjadi faktor yang semakin penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar melalui platform digital, dan

mempercepat proses bisnis. Selain itu, Peran Pemerintah yang baik akan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, maupun lembaga pembiayaan.

Oleh karena itu, meningkatnya jumlah UMKM di Indonesia merupakan peluang besar untuk memperkuat perekonomian nasional. Akan tetapi, besarnya jumlah pelaku usaha tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pengelolaan usaha agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. Dalam konteks inilah, pembahasan mengenai manajemen keuangan, pemahaman teknologi, dan Peran Pemerintah menjadi sangat penting karena ketiga aspek tersebut merupakan faktor strategis yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan UMKM di tengah perubahan lingkungan bisnis yang semakin dinamis.

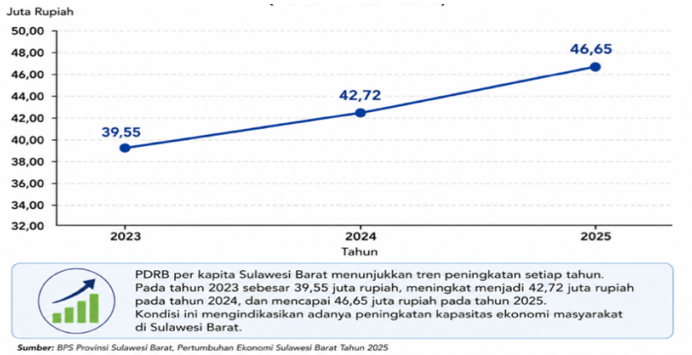
C. Kondisi Ekonomi dan UMKM Sulawesi Barat

Perekonomian daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkembangnya berbagai lapangan usaha akan menciptakan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan memperkuat daya saing. Sebaliknya, perlambatan ekonomi dapat mengurangi daya beli masyarakat sehingga berdampak terhadap

keberlangsungan usaha, khususnya UMKM yang memiliki keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, analisis kondisi ekonomi daerah menjadi penting untuk memberikan gambaran mengenai lingkungan eksternal yang memengaruhi kinerja UMKM di Provinsi Sulawesi Barat.

Perkembangan ekonomi Sulawesi Barat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang positif. Berbagai indikator makroekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, laju pertumbuhan ekonomi, serta pertumbuhan lapangan usaha, memperlihatkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang berpotensi memperkuat kapasitas masyarakat dan dunia usaha. Kondisi tersebut memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang, namun keberhasilan dalam memanfaatkan peluang tersebut sangat bergantung pada kemampuan internal pelaku usaha serta dukungan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pembahasan pada bagian ini difokuskan pada tiga indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi Sulawesi Barat, yaitu PDRB per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan lapangan usaha.

Gambar 2 PDRB Per Kapita Sulawesi Barat Tahun 2023–2025



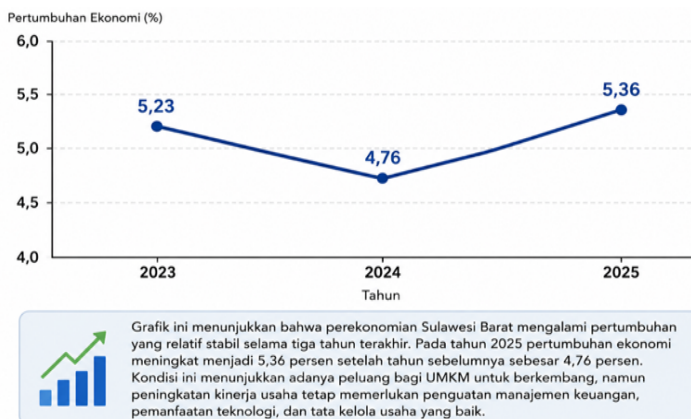
PDRB per kapita merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Indikator ini sering digunakan untuk mengukur kapasitas ekonomi masyarakat sekaligus menunjukkan tingkat produktivitas ekonomi suatu daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, PDRB per kapita mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2023–2025. Nilainya meningkat dari Rp39,55 juta pada tahun 2023 menjadi Rp42,72 juta pada tahun 2024, kemudian kembali meningkat menjadi Rp46,65 juta pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Barat terus berkembang. Semakin tingginya PDRB per kapita mengindikasikan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan daya beli terhadap berbagai barang dan jasa. Bagi pelaku UMKM, kondisi tersebut menjadi peluang untuk memperluas pasar, meningkatkan volume penjualan, serta

mengembangkan skala usaha melalui peningkatan kapasitas produksi maupun diversifikasi produk.

Meskipun demikian, peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat belum tentu memberikan manfaat yang sama bagi seluruh UMKM. Pelaku usaha dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan agar peningkatan pendapatan dapat dialokasikan secara efektif untuk modal kerja, investasi, maupun pengembangan usaha. Selain itu, pemahaman teknologi menjadi semakin penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pemasaran melalui platform digital, serta mempermudah transaksi keuangan. Pada saat yang sama, peran pemerintah menjadi faktor strategis dalam mendukung pengembangan UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan, pelatihan, pendampingan, fasilitasi digitalisasi, serta pengembangan akses pasar. Dengan demikian, peningkatan PDRB per kapita tidak hanya mencerminkan membaiknya kondisi ekonomi daerah, tetapi juga menunjukkan semakin besarnya peluang pengembangan UMKM apabila didukung oleh kapasitas pelaku usaha dan kebijakan pemerintah yang efektif.

**Gambar 3 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat
Tahun 2023–2025**



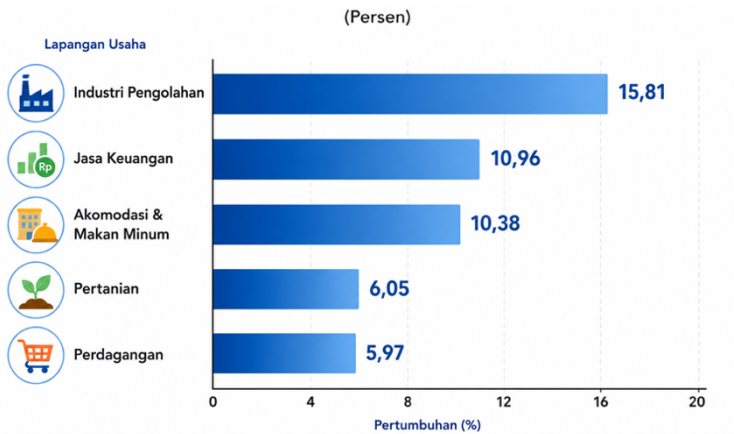
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah selama periode tertentu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, pertumbuhan ekonomi daerah selama periode 2023–2025 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,23%, kemudian mengalami perlambatan menjadi 4,76% pada tahun 2024, sebelum kembali meningkat menjadi 5,36% pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Sulawesi Barat mampu mempertahankan momentum pertumbuhan meskipun menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi yang positif mencerminkan meningkatnya aktivitas pada berbagai sektor produktif, seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa. Sebagian besar aktivitas pada sektor-sektor tersebut melibatkan UMKM sebagai pelaku utama ekonomi daerah. Oleh karena itu, meningkatnya pertumbuhan ekonomi

membuka peluang bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jaringan pemasaran, dan memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi regional.

Namun demikian, peluang tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh UMKM. Masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan kemampuan dalam mengelola keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta terbatasnya akses terhadap pembiayaan, informasi, dan pendampingan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian UMKM belum mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kinerja UMKM memerlukan sinergi antara penguatan manajemen keuangan, peningkatan pemahaman teknologi, dan optimalisasi peran pemerintah melalui kebijakan pemberdayaan, pelatihan, fasilitasi digitalisasi, pengembangan kemitraan, serta perluasan akses pasar. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing UMKM sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat.

Gambar 4 Pertumbuhan Lapangan Usaha Sulawesi Barat Tahun 2025



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2025

Pertumbuhan lapangan usaha memberikan gambaran mengenai sektor-sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat tahun 2025, sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,81%, diikuti oleh jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,96%, serta penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 10,38%. Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh sebesar 6,05%, sedangkan sektor perdagangan besar dan eceran mencapai pertumbuhan sebesar 5,97%.

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sektor yang menjadi ruang aktivitas UMKM mengalami perkembangan yang positif. Pertumbuhan industri pengolahan menciptakan peluang peningkatan nilai tambah produk lokal, sedangkan perkembangan sektor jasa keuangan memperluas akses terhadap layanan pembiayaan dan transaksi digital. Pertumbuhan sektor akomodasi dan makan minum juga membuka peluang bagi UMKM

kuliner, pariwisata, dan ekonomi kreatif untuk memperluas pasar. Sementara itu, sektor pertanian dan perdagangan tetap menjadi fondasi utama aktivitas ekonomi masyarakat Sulawesi Barat.

Besarnya peluang tersebut perlu didukung oleh kapasitas internal pelaku UMKM. Manajemen keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha mengalokasikan sumber daya secara efisien, mengendalikan arus kas, dan merencanakan investasi usaha secara lebih terarah. Pemahaman teknologi mendukung peningkatan efisiensi operasional melalui pemanfaatan aplikasi digital, pemasaran daring, sistem pembayaran elektronik, dan platform perdagangan digital. Selain itu, peran pemerintah menjadi sangat penting melalui penyediaan pelatihan, pendampingan usaha, kemudahan akses pembiayaan, fasilitasi sertifikasi produk, penguatan kemitraan usaha, serta program digitalisasi UMKM yang mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Secara keseluruhan, perkembangan indikator ekonomi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi daerah memberikan prospek yang positif bagi pengembangan UMKM. Namun, peluang tersebut hanya akan menghasilkan peningkatan kinerja usaha apabila didukung oleh kemampuan pelaku UMKM dalam mengelola keuangan, memanfaatkan teknologi, serta memperoleh dukungan pemerintah melalui kebijakan dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, manajemen keuangan, pemahaman teknologi, dan peran

pemerintah menjadi tiga faktor yang saling melengkapi dalam membentuk UMKM yang produktif, adaptif, inovatif, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat.

BAB

2

Konsep Kinerja UMKM

A. Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan pendapatan, serta memperkuat ketahanan ekonomi

masyarakat. Di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, UMKM mendominasi jumlah unit usaha dan menjadi penyerap tenaga kerja terbesar. Menurut OECD (2023), sektor UMKM mencakup lebih dari 90% unit usaha di berbagai negara serta memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, sehingga menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Di Indonesia, kontribusi UMKM tidak hanya terlihat dari aspek ekonomi, tetapi juga dari perannya dalam pembangunan sosial. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (2024), terdapat lebih dari 65 juta UMKM yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi nasional sangat dipengaruhi oleh kemampuan UMKM dalam meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing di tengah perubahan lingkungan bisnis.

Secara konseptual, definisi UMKM berbeda di setiap negara karena disesuaikan dengan karakteristik ekonomi masing-masing. World Bank (2023) mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, nilai aset, dan omzet tahunan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembiayaan dan pemberdayaan usaha. Sementara itu, International Labour Organization (ILO, 2023) menekankan bahwa UMKM merupakan sektor usaha yang bersifat

fleksibel, padat karya, mudah beradaptasi terhadap perubahan ekonomi, serta berperan penting dalam menciptakan kesempatan kerja yang inklusif. Dengan demikian, konsep UMKM tidak hanya mencerminkan ukuran usaha, tetapi juga fungsi sosial dan ekonomi dalam pembangunan.

Di Indonesia, klasifikasi UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengelompokkan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan modal usaha maupun hasil penjualan tahunan. Klasifikasi ini menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemerintah, pemberian insentif, akses pembiayaan, serta berbagai program pemberdayaan sehingga setiap kelompok usaha memperoleh dukungan yang sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Dari perspektif manajemen, UMKM merupakan organisasi bisnis yang mengelola berbagai sumber daya, seperti modal, sumber daya manusia, teknologi, informasi, dan kemampuan kewirausahaan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Pendekatan *Resource-Based View* (RBV) yang dikemukakan Barney (1991) menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif tidak hanya ditentukan oleh kepemilikan aset, tetapi juga oleh kemampuan mengelola sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah tergantikan. Dalam konteks UMKM, sumber daya tersebut mencakup kompetensi manajerial, inovasi,

literasi keuangan, kemampuan digital, dan orientasi kewirausahaan yang menjadi penentu utama keberhasilan usaha.

Perkembangan ekonomi digital telah mengubah paradigma pengelolaan UMKM. Jika sebelumnya UMKM identik dengan usaha tradisional yang memiliki keterbatasan modal dan teknologi, kini digitalisasi membuka peluang yang lebih luas melalui pemanfaatan e-commerce, media sosial, sistem pembayaran digital, layanan financial technology (fintech), serta aplikasi manajemen usaha. Transformasi digital memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan, serta menghasilkan keputusan bisnis yang lebih cepat dan berbasis data.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan beradaptasi terhadap teknologi menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Rosyidiana dan Narsa (2024) menegaskan bahwa digitalisasi dan inovasi berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM, sedangkan Rita dan Nastiti (2024) menemukan bahwa integrasi teknologi digital dengan praktik manajemen keuangan mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan profitabilitas usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM pada era modern tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya aset atau omzet, tetapi juga oleh kemampuan mengelola teknologi, informasi, dan inovasi secara berkelanjutan.

Dengan demikian, UMKM pada era kontemporer dipahami sebagai organisasi bisnis yang mengintegrasikan kemampuan manajerial, inovasi, teknologi, literasi keuangan, dan Peran Pemerintah untuk menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan skala usaha, tetapi juga pada penguatan kapasitas organisasi, transformasi digital, inovasi, dan Peran pemerintah yang baik agar mampu meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun global.

B. Perkembangan UMKM Indonesia

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dan menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pengurangan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia (2024), jumlah UMKM telah mencapai lebih dari 65 juta unit usaha atau sekitar 99% dari seluruh pelaku usaha nasional. Sektor ini juga menyumbang sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan perekonomian Indonesia sangat bergantung pada kemampuan UMKM dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan inovasi.

Dominasi UMKM mencerminkan karakteristik perekonomian Indonesia yang berbasis ekonomi kerakyatan (*people based economy*). Dibandingkan perusahaan besar, UMKM memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar karena struktur organisasi yang sederhana dan proses pengambilan keputusan yang relatif cepat. Fleksibilitas tersebut menjadikan UMKM lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan seperti akses pembiayaan, penguasaan teknologi, kapasitas manajerial, serta kualitas sumber daya manusia (OECD, 2023).

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan terbesar yang pernah dihadapi sektor UMKM. Pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan permintaan, terganggunya rantai pasok, serta melemahnya daya beli masyarakat sehingga banyak UMKM mengalami penurunan omzet bahkan menghentikan operasional usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan produksi, tetapi juga oleh kualitas manajemen keuangan, kemampuan beradaptasi, serta pengelolaan risiko usaha (World Bank, 2023).

Memasuki masa pemulihan pascapandemi, perkembangan UMKM kembali menunjukkan arah yang positif. Berbagai kebijakan pemerintah, seperti bantuan produktif, restrukturisasi kredit, subsidi bunga, Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, dan program digitalisasi, menjadi

faktor penting dalam mempercepat pemulihan sektor ini. Rosyidiana dan Narsa (2024) menjelaskan bahwa keberhasilan pemulihan UMKM didukung oleh meningkatnya inovasi, literasi, dan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan memperluas pasar.

Transformasi digital menjadi ciri utama perkembangan UMKM Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pemanfaatan teknologi tidak lagi terbatas pada kegiatan promosi, tetapi telah mencakup pemasaran digital, perdagangan melalui marketplace, sistem pembayaran elektronik, pencatatan keuangan berbasis aplikasi, pengelolaan persediaan, hingga pemanfaatan data pelanggan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Digitalisasi memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, serta memperkuat daya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap kinerja UMKM. Rita dan Nastiti (2024) menemukan bahwa transformasi digital meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan profitabilitas usaha. Purnomo et al. (2024) juga menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan efektivitas proses bisnis, sedangkan Nurachmad et al. (2025) menegaskan bahwa sistem informasi digital mampu meningkatkan kualitas informasi keuangan serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih

tepat. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan mengadopsi teknologi telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing UMKM.

Selain digitalisasi, perkembangan UMKM juga ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap literasi keuangan, inovasi produk, dan orientasi kewirausahaan. Pelaku usaha semakin menyadari bahwa keberhasilan bisnis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan produk, tetapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan, memahami kebutuhan pasar, serta melakukan inovasi secara berkelanjutan. Tubastuvi et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan akses pembiayaan formal berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja UMKM melalui pengelolaan modal yang lebih efektif dan pengambilan keputusan yang lebih rasional.

Meskipun mengalami perkembangan yang signifikan, UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses pembiayaan, lemahnya kapasitas manajerial, produktivitas yang belum optimal, serta belum meratanya infrastruktur digital, terutama di luar Pulau Jawa. Oleh karena itu, pengembangan UMKM memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem usaha melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, digitalisasi, serta akses pembiayaan. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan UMKM yang lebih

produktif, inovatif, tangguh, dan berdaya saing sehingga tetap menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan.

C. Indikator Kinerja UMKM

Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan ukuran keberhasilan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Pengukuran kinerja menjadi aspek penting karena memberikan gambaran mengenai kemampuan UMKM dalam mempertahankan keberlangsungan usaha, meningkatkan daya saing, serta menciptakan nilai tambah bagi pemilik usaha maupun pemangku kepentingan lainnya. Berbeda dengan perusahaan besar yang umumnya menggunakan indikator keuangan yang kompleks, pengukuran kinerja UMKM lebih banyak memanfaatkan kombinasi indikator keuangan dan nonkeuangan agar mampu menggambarkan kondisi usaha secara menyeluruh (Rita & Nastiti, 2024).

Secara umum, indikator kinerja UMKM dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu pertumbuhan penjualan, peningkatan laba, produktivitas usaha, pertumbuhan aset, kemampuan mempertahankan pelanggan, perluasan pangsa pasar, serta keberlanjutan usaha. Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan pelaku usaha dalam meningkatkan volume transaksi dan memperluas jangkauan pasar. Indikator ini sering digunakan karena relatif mudah diukur serta

menunjukkan respons pasar terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Sementara itu, peningkatan laba menggambarkan efisiensi pengelolaan biaya sekaligus kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan (Tubastuvi et al., 2024).

Selain indikator finansial, perkembangan literatur menunjukkan bahwa indikator nonfinansial juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam menilai keberhasilan UMKM. Kepuasan pelanggan, loyalitas konsumen, inovasi produk, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi, kualitas pelayanan, serta efektivitas pengelolaan sumber daya manusia merupakan indikator yang semakin banyak digunakan dalam penelitian mengenai kinerja UMKM. Indikator-indikator tersebut mencerminkan kemampuan organisasi dalam mempertahankan keunggulan kompetitif di tengah perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis (Rosyidiana & Narsa, 2024).

Dalam era transformasi digital, indikator kinerja UMKM mengalami perkembangan yang lebih luas. Penguasaan teknologi informasi, intensitas penggunaan platform digital, kemampuan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran, hingga efektivitas penggunaan sistem pembayaran digital mulai dijadikan ukuran keberhasilan usaha. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses pasar sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan profitabilitas

UMKM. Oleh karena itu, pengukuran kinerja pada era digital tidak lagi hanya berorientasi pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan kemampuan organisasi dalam melakukan transformasi digital secara berkelanjutan (Purnomo et al., 2024).

Lebih lanjut, Kusumawardani dan Syafis (2025) menjelaskan bahwa penerapan Total Quality Management (TQM) dan transformasi digital secara simultan mampu meningkatkan kinerja keuangan UMKM melalui peningkatan kualitas produk, efisiensi proses bisnis, serta kemampuan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, indikator kinerja UMKM pada era modern mencerminkan integrasi antara pencapaian finansial, efektivitas operasional, inovasi, dan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Berdasarkan berbagai indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM merupakan konsep multidimensional yang tidak hanya diukur melalui besarnya keuntungan yang diperoleh, tetapi juga melalui kemampuan usaha dalam menciptakan pertumbuhan, meningkatkan daya saing, mempertahankan keberlanjutan bisnis, dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan usaha.

D. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kinerja UMKM

Kinerja Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang menentukan kemampuan usaha dalam mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam perspektif Resource-Based View (RBV), keunggulan kompetitif organisasi

bergantung pada kemampuan mengelola sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak mudah digantikan (Barney, 1991). Pada UMKM, sumber daya tersebut mencakup kemampuan manajerial, kualitas sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, penguasaan teknologi, inovasi, serta jejaring usaha. Oleh karena itu, peningkatan kinerja tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi juga oleh efektivitas pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki.

Secara umum, faktor penentu kinerja UMKM dapat dibedakan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kapasitas organisasi dalam mengelola sumber daya, sedangkan faktor eksternal mencakup kondisi pasar, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, akses pembiayaan, serta dinamika ekonomi. OECD (2023) menegaskan bahwa peningkatan produktivitas UMKM di negara berkembang sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, inovasi, digitalisasi, dan dukungan ekosistem usaha yang kondusif.

Salah satu faktor internal yang paling menentukan adalah manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha merencanakan penggunaan dana, menyusun anggaran, mengelola arus kas, melakukan pencatatan transaksi, serta mengambil keputusan investasi secara tepat. Praktik tersebut membantu menjaga likuiditas, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat ketahanan usaha

terhadap ketidakpastian ekonomi. Penelitian Rita dan Nastiti (2024) menunjukkan bahwa penerapan manajemen keuangan yang didukung transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi, mengendalikan biaya, dan memperbaiki kinerja keuangan UMKM. Temuan serupa disampaikan Muslimin et al. (2025) yang menegaskan bahwa perencanaan keuangan dan struktur permodalan berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha melalui peningkatan profitabilitas.

Selain manajemen keuangan, pemanfaatan teknologi menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing UMKM. Digitalisasi telah mengubah berbagai aktivitas bisnis, mulai dari pemasaran, transaksi, pengelolaan pelanggan, hingga pencatatan keuangan. Adopsi teknologi digital memungkinkan UMKM memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, menekan biaya transaksi, serta mempercepat pengambilan keputusan. Rosyidiana dan Narsa (2024) menemukan bahwa digitalisasi dan inovasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja UMKM, sedangkan Purnomo et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi proses bisnis dan optimalisasi pemasaran digital. Nurachmad et al. (2025) juga menegaskan bahwa sistem informasi berbasis digital meningkatkan kualitas informasi keuangan dan efektivitas pengambilan keputusan.

Literasi keuangan dan akses terhadap pembiayaan turut menjadi faktor penting. Pelaku

usaha yang memiliki literasi keuangan yang baik lebih mampu mengelola modal kerja, mengendalikan risiko, memanfaatkan produk keuangan, serta menyusun strategi pengembangan usaha. Tubastuvi et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan akses pembiayaan formal berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Sejalan dengan itu, World Bank (2023) menegaskan bahwa perluasan akses pembiayaan merupakan salah satu prasyarat utama bagi pertumbuhan UMKM di negara berkembang.

Dari sisi eksternal, dukungan pemerintah memiliki peran strategis melalui penyediaan regulasi yang kondusif, akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, sertifikasi produk, serta percepatan digitalisasi. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan digital, dan fasilitasi pemasaran memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas UMKM. Harsono dan Rinanda (2025) menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM semakin optimal apabila didukung collaborative governance yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat.

Selain itu, inovasi produk, orientasi kewirausahaan, kualitas sumber daya manusia, dan kemampuan beradaptasi terhadap persaingan juga memengaruhi keberhasilan usaha. UMKM yang mampu berinovasi, memanfaatkan teknologi, mengelola keuangan secara efektif, serta membangun

jejaring bisnis memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, kinerja UMKM merupakan hasil sinergi antara faktor internal dan eksternal, sehingga strategi pengembangannya perlu dilakukan secara komprehensif untuk menciptakan usaha yang produktif, adaptif, dan berdaya saing.

E. Tantangan UMKM Di Era Digital

Perkembangan teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis secara signifikan dan mendorong perubahan cara organisasi menjalankan aktivitas usahanya. Digitalisasi kini tidak lagi dipandang sebagai pilihan, melainkan menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing dan mempertahankan keberlanjutan usaha. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), transformasi digital membuka peluang dalam memperluas pasar, meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki kualitas layanan, serta menciptakan inovasi produk dan proses bisnis. Namun, pemanfaatan teknologi digital juga menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi agar implementasinya mampu memberikan manfaat yang optimal (OECD, 2023).

Dalam *perspektif Technology Organization Environment* (TOE) *Framework* yang dikembangkan oleh Tornatzky dan Fleischer (1990), keberhasilan adopsi teknologi dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu kesiapan teknologi, kesiapan organisasi, dan dukungan lingkungan eksternal. Ketiga aspek

tersebut saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan transformasi digital UMKM. Meskipun berbagai platform digital semakin mudah diakses, banyak UMKM masih menghadapi kendala dalam memanfaatkan teknologi secara optimal akibat keterbatasan sumber daya, kemampuan organisasi, maupun dukungan lingkungan usaha.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi digital pelaku UMKM. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan mengoperasikan perangkat teknologi, tetapi juga memahami aplikasi bisnis, mengelola data, memanfaatkan pembayaran digital, serta menerapkan pemasaran berbasis internet. Di berbagai daerah, pemanfaatan teknologi masih didominasi untuk promosi melalui media sosial dan belum terintegrasi dengan sistem pengelolaan usaha. Purnomo et al. (2024) menunjukkan bahwa rendahnya literasi digital menyebabkan pemanfaatan teknologi belum mampu meningkatkan produktivitas secara maksimal karena belum dimanfaatkan sebagai alat pengambilan keputusan maupun pengelolaan operasional.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur digital masih menjadi hambatan penting. Kualitas jaringan internet, akses terhadap perangkat teknologi, serta biaya implementasi sistem digital belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini menciptakan kesenjangan digital (*digital divide*) antara UMKM yang telah mengadopsi teknologi dengan UMKM yang masih menjalankan proses bisnis secara konvensional. OECD (2023) menegaskan bahwa

pemerataan infrastruktur digital menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Keberhasilan transformasi digital juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Penggunaan aplikasi akuntansi, marketplace, sistem pembayaran digital, hingga teknologi berbasis *Artificial Intelligence* (AI) memerlukan kompetensi yang memadai. Nurachmad et al. (2025) menjelaskan bahwa investasi teknologi hanya memberikan dampak optimal apabila diikuti peningkatan kapasitas SDM, kesiapan organisasi, dan dukungan manajemen terhadap perubahan. Dengan demikian, digitalisasi merupakan proses transformasi organisasi, bukan sekadar adopsi perangkat teknologi.

Perubahan perilaku konsumen turut menjadi tantangan baru. Konsumen semakin mengutamakan kemudahan transaksi, kecepatan layanan, keamanan pembayaran, dan akses informasi yang transparan. Oleh karena itu, UMKM perlu mengintegrasikan teknologi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Kusumawardani dan Syafis (2025) menunjukkan bahwa penerapan transformasi digital yang didukung *Total Quality Management* (TQM) mampu meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus memperbaiki kinerja usaha.

Digitalisasi juga memperluas ruang persaingan. Kehadiran marketplace dan platform e-commerce membuat UMKM tidak hanya bersaing dengan pelaku usaha lokal, tetapi juga dengan produk

nasional maupun internasional. Rita dan Nastiti (2024) menemukan bahwa UMKM yang mampu mengintegrasikan teknologi digital dengan manajemen keuangan memiliki efisiensi operasional dan profitabilitas yang lebih baik dibandingkan usaha yang masih mengandalkan sistem konvensional. Selain itu, meningkatnya penggunaan teknologi menuntut perhatian terhadap keamanan siber dan perlindungan data pelanggan, sementara keterbatasan pembiayaan masih menjadi kendala dalam investasi digital (UNCTAD, 2024).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, perusahaan teknologi, dan pelaku usaha. Dukungan berupa penguatan infrastruktur digital, peningkatan literasi digital, perluasan akses pembiayaan, pendampingan teknologi, serta regulasi yang mendukung menjadi faktor penting dalam mempercepat transformasi UMKM. Harsono dan Rinanda (2025) menegaskan bahwa pendekatan collaborative governance mampu memperkuat ekosistem digital UMKM melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, era digital menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM. Keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kapasitas organisasi, akses pembiayaan, keamanan informasi, dan dukungan kebijakan. Oleh karena itu, digitalisasi perlu dipandang sebagai proses transformasi

organisasi yang terintegrasi guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di masa depan.

BAB

3

Manajemen Keuangan UMKM

A. Konsep Dasar Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan fungsi utama dalam pengelolaan organisasi yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional, pertumbuhan usaha, dan pencapaian tujuan bisnis. Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), manajemen keuangan tidak hanya mencakup pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan, tetapi juga meliputi perencanaan, pengalokasian, pengendalian, serta evaluasi penggunaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan UMKM mengoptimalkan modal

yang terbatas, menjaga likuiditas, mengurangi risiko keuangan, dan meningkatkan nilai tambah usaha.

Secara konseptual, manajemen keuangan merupakan proses pengambilan keputusan terkait perolehan, penggunaan, dan pengelolaan dana untuk mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, orientasinya tidak hanya pada maksimalisasi laba (profit maximization), tetapi juga pada penciptaan nilai (value creation), stabilitas keuangan, dan keberlanjutan usaha. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, fungsi manajemen keuangan berkembang menjadi instrumen strategis yang mendukung pengelolaan modal kerja, investasi, pembiayaan, dan manajemen risiko.

UMKM menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan manajemen keuangan, antara lain keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, minimnya pemanfaatan teknologi, dan belum optimalnya penerapan sistem akuntansi. Tidak sedikit pelaku usaha yang masih mencampurkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha sehingga sulit mengevaluasi kondisi keuangan secara objektif. Akibatnya, keputusan investasi maupun pembiayaan sering didasarkan pada intuisi dibandingkan analisis keuangan yang sistematis, sehingga mengurangi kemampuan UMKM untuk berkembang dan memperoleh akses pembiayaan formal.

Seiring perkembangan lingkungan bisnis, paradigma manajemen keuangan telah bergeser dari fungsi administratif menuju fungsi strategis. Jika

sebelumnya berfokus pada pencatatan transaksi dan pengawasan arus kas, kini manajemen keuangan mencakup analisis investasi, penyusunan anggaran, pengelolaan struktur modal, pengendalian risiko, hingga pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi akuntansi berbasis cloud, sistem pembayaran digital, Financial Technology (FinTech), dan analitik data. Transformasi ini memungkinkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan berbasis informasi.

Bagi UMKM, pengelolaan modal kerja menjadi aspek yang sangat penting karena menentukan kemampuan usaha memenuhi kebutuhan operasional, seperti pembelian bahan baku, pembayaran tenaga kerja, dan pemenuhan kewajiban kepada pemasok. Kesalahan dalam mengelola kas, piutang, atau persediaan dapat mengganggu likuiditas dan menghambat pertumbuhan usaha. Selain itu, informasi keuangan yang akurat menjadi dasar dalam menentukan harga jual, mengevaluasi efisiensi biaya, menilai kelayakan investasi, serta memilih sumber pembiayaan yang paling sesuai sehingga mampu meningkatkan daya saing usaha.

Dalam konteks pembangunan ekonomi, penguatan manajemen keuangan UMKM berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan ketahanan ekonomi nasional. Pelaku usaha yang mampu mengelola keuangan secara profesional cenderung lebih mudah memperoleh akses pembiayaan, memperluas pasar, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Rita dan Nastiti

(2024) menunjukkan bahwa praktik manajemen keuangan yang baik meningkatkan efisiensi operasional dan keberlanjutan usaha, sedangkan Tubastuvi et al. (2024) menegaskan bahwa manajemen keuangan yang sistematis memperkuat kemampuan UMKM dalam mengelola risiko dan mengambil keputusan investasi.

Penelitian Hidayat (2025a) juga menunjukkan bahwa perilaku keuangan memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan, khususnya pada era digital dengan meningkatnya penggunaan layanan Buy Now Pay Later (BNPL). Sementara itu, Hidayat (2025b) menegaskan bahwa literasi keuangan, pengendalian perilaku keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital berkontribusi terhadap kualitas pengambilan keputusan dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, manajemen keuangan merupakan fondasi utama dalam membangun UMKM yang produktif, adaptif, dan berdaya saing. Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan menjadi prasyarat penting bagi UMKM untuk meningkatkan akses pembiayaan, menghadapi dinamika pasar, dan mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

B. Perencanaan Keuangan Usaha

Perencanaan keuangan (*financial planning*) merupakan salah satu pilar utama dalam manajemen keuangan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan usaha. Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perencanaan keuangan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas

administratif, melainkan sebagai proses strategis yang menghubungkan keputusan operasional, investasi, dan pembiayaan guna mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan usaha. Melalui perencanaan yang baik, pelaku UMKM dapat mengantisipasi kebutuhan dana, mengurangi risiko keuangan, dan memanfaatkan peluang bisnis secara lebih optimal (Brigham & Houston, 2022).

Secara konseptual, *financial planning* merupakan proses sistematis yang meliputi penetapan tujuan keuangan, identifikasi sumber daya yang dimiliki, penyusunan strategi pencapaian tujuan, serta evaluasi terhadap implementasinya. Gitman, Juchau, dan Flanagan (2022) menjelaskan bahwa perencanaan keuangan mengintegrasikan keputusan investasi, pembiayaan, dan operasional sehingga perusahaan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, profitabilitas, dan likuiditas. Dengan demikian, perencanaan keuangan tidak hanya berorientasi pada penyusunan anggaran, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis.

Dalam perspektif *Resource Based View* (RBV), kemampuan menyusun perencanaan keuangan merupakan kapabilitas strategis yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Pengelolaan sumber daya keuangan yang efektif memungkinkan UMKM mengoptimalkan modal yang terbatas menjadi investasi produktif yang mendukung pertumbuhan usaha. Sebaliknya, lemahnya perencanaan keuangan sering menyebabkan

keputusan bisnis didasarkan pada intuisi, sehingga meningkatkan risiko kekurangan modal kerja, gangguan likuiditas, dan rendahnya kemampuan beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Transformasi digital semakin memperkuat pentingnya financial planning. Berbagai aplikasi akuntansi berbasis *cloud*, sistem pembayaran digital, *mobile banking*, serta *financial dashboard* memungkinkan pelaku UMKM melakukan pencatatan transaksi, proyeksi arus kas, dan evaluasi kinerja secara *real time*. Pemanfaatan teknologi tersebut meningkatkan akurasi informasi keuangan sehingga keputusan bisnis dapat diambil secara lebih cepat dan berbasis data.

Tujuan utama perencanaan keuangan adalah memastikan seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan keuangan mendukung pertumbuhan usaha melalui penyusunan proyeksi kebutuhan modal, menjaga stabilitas keuangan dengan mengantisipasi fluktuasi pendapatan dan biaya, serta meningkatkan efisiensi penggunaan modal melalui penentuan prioritas investasi. Selain itu, financial planning berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko karena membantu pelaku usaha menyusun berbagai skenario untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi, perubahan permintaan pasar, maupun dinamika regulasi.

Penyusunan perencanaan keuangan dimulai dengan analisis kondisi internal dan eksternal perusahaan, meliputi posisi kas, struktur biaya,

kapasitas produksi, kondisi pasar, tingkat persaingan, hingga perkembangan teknologi. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam menetapkan tujuan keuangan yang spesifik, terukur, realistis, relevan, dan memiliki batas waktu (SMART). Tahap berikutnya adalah menyusun strategi keuangan yang mencakup proyeksi penjualan, estimasi kebutuhan modal, pengendalian biaya, pengelolaan arus kas, serta keputusan investasi yang selaras dengan kemampuan finansial perusahaan.

Dalam praktiknya, komponen penting financial planning meliputi sales forecasting, analisis pasar, proyeksi kebutuhan modal, dan perencanaan investasi. Peramalan penjualan menjadi dasar dalam menentukan kapasitas produksi, kebutuhan modal kerja, serta target keuntungan. Selanjutnya, proyeksi kebutuhan modal membantu perusahaan mengalokasikan dana untuk modal kerja, investasi aset tetap, maupun pengembangan teknologi. Perencanaan investasi yang baik memungkinkan UMKM meningkatkan produktivitas melalui pembelian aset, digitalisasi usaha, dan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung daya saing jangka panjang.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Rita dan Nastiti (2024) menemukan bahwa financial planning meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, dan keberlanjutan usaha. Tubastuvi et al. (2024) juga menyatakan bahwa perencanaan keuangan yang

sistematis memperkuat kemampuan UMKM dalam mengelola risiko, menjaga likuiditas, serta meningkatkan profitabilitas. Sementara itu, Hidayat (2025a) menegaskan bahwa efektivitas financial planning semakin tinggi apabila didukung oleh literasi keuangan, perilaku keuangan yang baik, serta pemanfaatan teknologi digital. Oleh karena itu, perencanaan keuangan harus dipandang sebagai instrumen strategis yang mengintegrasikan pengelolaan modal, investasi, dan pengambilan keputusan guna mewujudkan UMKM yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

C. Penganggaran, Arus Kas, dan Laporan Keuangan

Setelah menyusun *financial planning*, tahapan berikutnya dalam siklus manajemen keuangan adalah implementasi melalui Penganggaran, arus kas, dan *financial reporting*. Ketiga komponen tersebut saling terintegrasi dalam mendukung pengelolaan keuangan UMKM.

Perencanaan Keuangan menetapkan tujuan strategis, Penganggaran mengalokasikan sumber daya, arus kas menjaga ketersediaan kas untuk operasional, sedangkan *financial reporting* menyajikan informasi keuangan sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Integrasi ketiganya menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha (Brigham & Houston, 2022).

Penganggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan yang mencakup estimasi pendapatan, biaya, investasi, dan kebutuhan

pembiayaan selama periode tertentu. Anggaran berfungsi sebagai instrumen perencanaan sekaligus pengendalian karena menghubungkan sasaran strategis dengan aktivitas operasional. Bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal, anggaran membantu menentukan prioritas penggunaan dana, mengendalikan biaya, serta mengantisipasi kebutuhan modal kerja dan investasi. Proses penyusunannya dimulai dari penetapan target usaha, estimasi pendapatan berdasarkan sales forecasting, identifikasi biaya tetap dan variabel, hingga evaluasi penyimpangan antara anggaran dan realisasi (*budget variance*). Jenis anggaran yang umum digunakan meliputi *operating budget*, *cash budget*, *capital budget*, *flexible budget*, dan *master budget*. Penelitian Rita dan Nastiti (2024) serta Tubastuvi et al. (2024) menunjukkan bahwa sistem penganggaran yang baik meningkatkan efisiensi biaya, profitabilitas, dan ketahanan finansial UMKM.

Tahap berikutnya adalah Manajemen arus kas, yaitu pengelolaan arus kas agar perusahaan selalu memiliki likuiditas yang memadai. Profitabilitas tidak selalu menjamin ketersediaan kas, sehingga banyak UMKM mengalami kesulitan operasional meskipun memperoleh laba. Menurut Brigham dan Houston (2022), arus kas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas untuk mendukung aktivitas bisnis secara berkelanjutan. Arus kas terdiri atas tiga komponen, yaitu *operating arus kas* yang berasal dari aktivitas operasional, *Investasi arus kas* yang berkaitan

dengan investasi aset tetap, dan Keuangan arus kas yang berasal dari aktivitas pembiayaan.

Pengelolaan arus kas dilakukan melalui proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas, pengendalian piutang, pengelolaan persediaan, serta pengaturan kewajiban kepada pemasok. Efektivitasnya juga dapat diukur menggunakan *Cash Conversion Cycle* (CCC), yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah investasi dalam persediaan menjadi kas. Semakin pendek siklus konversi kas, semakin baik kondisi likuiditas perusahaan. Rita dan Nastiti (2024), Tubastuvi et al. (2024), serta Hidayat (2025a, 2025b) menunjukkan bahwa pengelolaan arus kas yang baik, didukung literasi keuangan dan teknologi digital, meningkatkan efisiensi modal kerja, mengurangi risiko likuiditas, serta memperkuat keberlanjutan usaha.

Tahap akhir adalah financial reporting, yaitu penyajian informasi keuangan secara sistematis sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan. Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan, kinerja operasional, perubahan modal, dan arus kas perusahaan sehingga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Di Indonesia, penyusunan laporan keuangan UMKM mengacu pada SAK UMKM yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia agar sesuai dengan karakteristik usaha mikro, kecil, dan menengah.

Komponen utama laporan keuangan meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Keberadaan laporan tersebut mempermudah pelaku UMKM mengevaluasi *profitabilitas, likuiditas*, serta struktur modal, sekaligus meningkatkan akses terhadap pembiayaan formal. Perkembangan teknologi turut mendorong penggunaan *cloud accounting, mobile accounting, financial dashboard*, dan *Artificial Intelligence (AI)* yang memungkinkan pencatatan transaksi, penyusunan laporan, serta analisis keuangan dilakukan secara otomatis dan *real-time*. Pemanfaatan teknologi tersebut meningkatkan akurasi informasi sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Secara keseluruhan, Penganggaran, arus kas, dan financial reporting membentuk siklus utama manajemen keuangan UMKM. Anggaran menjadi pedoman penggunaan sumber daya, pengelolaan arus kas menjaga stabilitas likuiditas, sedangkan laporan keuangan menyediakan informasi untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan menyusun strategi berikutnya. Penelitian Rita dan Nastiti (2024), Tubastuvi et al. (2024), serta Hidayat (2025b) menegaskan bahwa integrasi ketiga aspek tersebut, didukung literasi keuangan dan transformasi digital, mampu meningkatkan efisiensi operasional, kualitas pengambilan keputusan, akses pembiayaan, serta keberlanjutan UMKM di tengah dinamika ekonomi digital.

D. Pengambilan Keputusan Keuangan

Keputusan Keuangan merupakan tahap arus kas strategis dalam siklus manajemen keuangan yang menentukan bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan, dimanfaatkan, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah melalui tahapan Keputusan Keuangan, Penganggaran, arus kas management, dan financial reporting, informasi yang dihasilkan menjadi dasar bagi manajemen dalam memilih alternatif keputusan yang paling tepat. Dengan demikian, keputusan keuangan merupakan integrasi dari seluruh proses manajemen keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, profitabilitas, dan keberlanjutan usaha (Brigham & Houston, 2022).

Dalam perspektif manajemen keuangan modern, keputusan keuangan tidak hanya berorientasi pada maksimalisasi laba, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian (*risk and return*), efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuan perusahaan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis (Ross et al., 2022). Bagi UMKM, proses ini menjadi semakin penting karena keterbatasan modal, dinamika pasar, perkembangan teknologi digital, dan meningkatnya persaingan menuntut keputusan yang cepat sekaligus berbasis informasi. Oleh karena itu, kualitas keputusan keuangan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan maupun keberlanjutan usaha.

Secara konseptual, *financial decision* mencakup tiga keputusan utama, yaitu keputusan investasi (*investment decision*), keputusan pembiayaan (*financing decision*), dan keputusan pengelolaan aset (*asset management decision*) (Brigham & Houston, 2022). Keputusan investasi berkaitan dengan penempatan dana pada aset yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan, keputusan pembiayaan menentukan sumber dana yang paling efisien, sedangkan pengelolaan aset bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar menghasilkan nilai tambah. Ketiga keputusan tersebut saling berkaitan karena investasi membutuhkan pembiayaan, sedangkan efektivitas pembiayaan akan menentukan kemampuan perusahaan mengelola aset secara produktif.

Perkembangan teori keuangan juga menunjukkan bahwa keputusan keuangan tidak selalu bersifat rasional. *Behavioral Finance Theory* menjelaskan bahwa keputusan dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti pengalaman, persepsi risiko, emosi, dan *overconfidence*. Sementara itu, *Prospect Theory* yang dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky menjelaskan bahwa individu cenderung lebih sensitif terhadap potensi kerugian daripada peluang keuntungan. Pada UMKM, kondisi tersebut sering terlihat ketika pemilik usaha terlalu berhati-hati dalam melakukan investasi atau sebaliknya terlalu optimistis menggunakan pembiayaan tanpa analisis yang memadai. Oleh karena itu, kualitas keputusan keuangan tidak hanya

dipengaruhi oleh informasi yang tersedia, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha menginterpretasikan informasi secara objektif.

Dalam perspektif *Resource Based View* (RBV), kemampuan mengambil keputusan keuangan merupakan kapabilitas strategis yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif (Barney, 1991). Kapabilitas tersebut diperkuat melalui *Financial Capability Theory*, yang menekankan pentingnya kombinasi antara pengetahuan keuangan, keterampilan, perilaku keuangan, serta akses terhadap layanan keuangan. Pelaku UMKM yang memiliki literasi keuangan tinggi cenderung lebih mampu mengevaluasi alternatif investasi, memilih sumber pembiayaan yang efisien, mengelola risiko, dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal.

Tujuan utama financial decision adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan tersebut meliputi peningkatan efisiensi penggunaan modal, menjaga likuiditas, meningkatkan profitabilitas, memperkuat struktur keuangan, serta mendukung pertumbuhan usaha melalui keputusan investasi dan pembiayaan yang tepat (Ross et al., 2022). Dalam praktiknya, keputusan tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan, seperti profitabilitas, struktur modal, kualitas laporan keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia, maupun faktor eksternal seperti inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan persaingan pasar.

Transformasi digital turut meningkatkan kualitas keputusan keuangan melalui pemanfaatan *Financial Technology* (FinTech), mobile banking, aplikasi akuntansi berbasis cloud, serta analitik berbasis *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi tersebut menyediakan informasi keuangan secara *real time*, mempermudah analisis arus kas, simulasi investasi, hingga evaluasi berbagai alternatif pembiayaan sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan akurat. Penelitian Rita dan Nastiti (2024) menunjukkan bahwa keputusan keuangan yang didukung praktik manajemen keuangan dan transformasi digital meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas UMKM. Temuan tersebut diperkuat oleh Tubastuvi et al. (2024), yang menyatakan bahwa literasi keuangan dan akses terhadap pembiayaan formal meningkatkan kualitas keputusan investasi serta ketahanan usaha. Selain itu, Hidayat (2025b) menegaskan bahwa perilaku keuangan, literasi keuangan, dan pemanfaatan teknologi digital berkontribusi terhadap pengambilan keputusan yang lebih rasional, termasuk dalam penggunaan layanan Buy Now Pay Later (BNPL) agar tetap produktif dan tidak meningkatkan risiko keuangan. Dengan demikian, financial decision menjadi fondasi penting bagi UMKM dalam menciptakan pertumbuhan usaha yang adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

BAB 4 | Pemanfaatan Teknologi UMKM

A. Transformasi Digital UMKM

Transformasi digital telah menjadi salah satu isu strategis dalam pembangunan ekonomi global seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi teknologi digital ke dalam berbagai aktivitas ekonomi telah mengubah cara organisasi menciptakan nilai, berinteraksi dengan pelanggan, serta mengelola proses bisnis secara lebih efisien. Perkembangan teknologi seperti komputasi awan (*cloud computing*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), analitik data (*big data analytics*), *Internet of Things* (IoT), dan platform digital telah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital yang semakin terhubung. Dalam konteks tersebut, transformasi digital tidak

lagi dipandang sebagai pilihan strategis, melainkan sebagai kebutuhan bagi pelaku usaha untuk mempertahankan daya saing di tengah dinamika pasar yang semakin kompetitif. OECD menegaskan bahwa digitalisasi telah mengubah mekanisme penciptaan nilai dalam berbagai sektor ekonomi, tetapi tingkat adopsinya masih beragam, terutama pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang umumnya menghadapi keterbatasan sumber daya, kompetensi digital, dan kapasitas investasi.

Perubahan lanskap ekonomi digital juga diikuti oleh perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan teknologi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Konsumen modern tidak hanya menginginkan produk yang berkualitas, tetapi juga mengharapkan proses transaksi yang cepat, mudah, aman, serta dapat diakses melalui berbagai saluran digital. Peningkatan penggunaan telepon pintar, internet berkecepatan tinggi, media sosial, dan aplikasi perdagangan elektronik telah membentuk pola konsumsi baru yang lebih mengutamakan kenyamanan (*convenience*), personalisasi layanan, serta interaksi secara *real time*. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM untuk mengubah pendekatan bisnis konvensional menuju model bisnis berbasis digital agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga merupakan respons strategis terhadap

perubahan preferensi dan ekspektasi konsumen yang terus berkembang.

Di Indonesia, UMKM memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi tulang punggung perekonomian nasional melalui kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja, pembentukan produk domestik bruto, dan pemerataan aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Meskipun demikian, sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan daya saing, seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, rendahnya literasi digital, lemahnya pengelolaan data usaha, serta keterbatasan kemampuan dalam mengembangkan inovasi berbasis teknologi. Dalam situasi tersebut, digitalisasi menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kapasitas UMKM melalui peningkatan efisiensi operasional, perluasan akses pasar, penguatan hubungan dengan pelanggan, serta pengambilan keputusan yang lebih berbasis data. Penelitian Hendrawan et al. (2024) menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan peluang yang signifikan bagi UMKM untuk mengotomatisasi proses bisnis, menekan biaya operasional, meningkatkan produktivitas, dan memperluas jangkauan pasar. Namun, keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, kualitas sumber daya manusia, serta strategi pengelolaan teknologi yang terencana.

Lebih lanjut, transformasi digital pada UMKM tidak hanya dipahami sebagai adopsi perangkat keras maupun perangkat lunak, tetapi merupakan

proses perubahan yang bersifat menyeluruh terhadap model bisnis, proses operasional, budaya organisasi, dan pola pengambilan keputusan. Digitalisasi mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan informasi secara lebih efektif dalam merancang strategi pemasaran, mengelola hubungan dengan pelanggan, mengendalikan persediaan, serta melakukan evaluasi kinerja usaha secara berkelanjutan. Perubahan tersebut memungkinkan UMKM menjadi lebih adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis, termasuk menghadapi perubahan permintaan pasar, persaingan global, maupun disrupsi teknologi yang berkembang sangat cepat. Oleh karena itu, transformasi digital harus dipandang sebagai proses strategis yang mengintegrasikan teknologi, manusia, dan proses bisnis untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi organisasi.

Urgensi transformasi digital semakin menguat ketika persaingan bisnis tidak lagi hanya ditentukan oleh skala usaha, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam mengelola informasi, memanfaatkan teknologi, dan menghasilkan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. UMKM yang mampu mengintegrasikan teknologi digital ke dalam aktivitas bisnisnya memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, mempercepat proses pelayanan, memperluas jaringan pemasaran, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui pemanfaatan data secara real time. Sebaliknya, keterlambatan dalam

mengadopsi teknologi berpotensi menyebabkan penurunan daya saing karena semakin besarnya kesenjangan produktivitas antara pelaku usaha yang telah terdigitalisasi dengan yang masih menggunakan pendekatan konvensional. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi faktor strategis dalam membangun ketahanan dan keberlanjutan UMKM di era ekonomi digital.

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai transformasi digital menjadi sangat relevan dalam konteks pengembangan UMKM. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, karakteristik, serta urgensi transformasi digital diperlukan sebagai landasan untuk menjelaskan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat daya saing, dan mendukung keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, subbab berikutnya akan menguraikan konsep transformasi digital secara lebih mendalam, termasuk perbedaan antara *digitization*, *digitalization*, dan *digital transformation*, sebagai dasar konseptual untuk memahami implementasi transformasi digital pada UMKM.

Transformasi digital merupakan konsep yang berkembang seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan bisnis. Pada awalnya, digitalisasi dipahami sebagai proses pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi

pekerjaan administratif. Namun, perkembangan teknologi seperti komputasi awan (*cloud computing*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), *Internet of Things* (IoT), *big data analytics*, dan *platform digital* telah mengubah makna digitalisasi menjadi suatu proses transformasi organisasi yang lebih komprehensif. Saat ini, transformasi digital dipandang sebagai perubahan strategis yang memengaruhi model bisnis, proses operasional, struktur organisasi, budaya kerja, hingga cara organisasi menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan. Perubahan tersebut menjadikan teknologi digital tidak lagi sekadar alat pendukung operasional, melainkan sumber utama keunggulan kompetitif dalam menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks.

Dalam literatur akademik, transformasi digital didefinisikan sebagai proses perubahan organisasi melalui pemanfaatan kombinasi teknologi informasi, komputasi, komunikasi, dan konektivitas untuk meningkatkan karakteristik organisasi secara signifikan. Definisi ini menegaskan bahwa transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan adopsi perangkat teknologi, tetapi juga mencakup perubahan cara organisasi merancang strategi, mengelola sumber daya, membangun hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Dengan kata lain, transformasi digital merupakan proses yang mengintegrasikan dimensi teknologi, organisasi, dan manusia sehingga

menghasilkan perubahan menyeluruh terhadap sistem bisnis.

Menurut Verhoef et al. (2021) menjelaskan bahwa transformasi digital merupakan tahap perkembangan tertinggi dalam evolusi digital organisasi. Transformasi ini tidak hanya menghasilkan perubahan pada proses bisnis, tetapi juga mendorong inovasi model bisnis (*business model innovation*) yang mampu mengubah cara perusahaan memperoleh pendapatan, membangun hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan nilai ekonomi. Menurut mereka, transformasi digital didukung oleh kemampuan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi digital dengan strategi bisnis, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola organisasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh investasi teknologi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dalam melakukan perubahan secara menyeluruh.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Schneider dan Kokshagina (2021) yang menyatakan bahwa transformasi digital merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan interaksi antara teknologi, inovasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Mereka menegaskan bahwa sebagian besar kegagalan transformasi digital bukan disebabkan oleh keterbatasan teknologi, melainkan oleh lemahnya kemampuan organisasi dalam mengelola perubahan (*change management*),

membangun kompetensi digital, dan menciptakan budaya inovasi. Oleh sebab itu, transformasi digital harus dipandang sebagai proses perubahan organisasi yang memerlukan kepemimpinan strategis, kolaborasi lintas fungsi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Dalam konteks UMKM, transformasi digital memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perusahaan besar. UMKM umumnya memiliki sumber daya keuangan, teknologi, dan tenaga kerja yang lebih terbatas sehingga proses transformasi digital dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. Meskipun demikian, fleksibilitas organisasi yang dimiliki UMKM justru menjadi salah satu keunggulan dalam mengadopsi teknologi baru. Struktur organisasi yang relatif sederhana memungkinkan proses pengambilan keputusan berlangsung lebih cepat sehingga inovasi digital dapat diimplementasikan secara lebih adaptif dibandingkan organisasi yang memiliki struktur birokrasi kompleks. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital pada UMKM lebih banyak ditentukan oleh kemampuan pemilik usaha dalam mengidentifikasi peluang teknologi, membangun kompetensi digital, serta memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan bisnis.

Di Indonesia, transformasi digital pada UMKM semakin memperoleh perhatian sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing nasional.

Hendrawan et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses bisnis, memperluas akses pasar, serta memperkuat hubungan dengan pelanggan melalui pemanfaatan berbagai platform digital. Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya literasi digital, keterbatasan investasi teknologi, minimnya kompetensi sumber daya manusia, serta belum optimalnya strategi pengelolaan teknologi pada sebagian besar UMKM. Oleh karena itu, transformasi digital perlu dipandang sebagai proses perubahan yang memerlukan dukungan ekosistem, termasuk kebijakan pemerintah, infrastruktur digital, akses pembiayaan, dan program peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Berbagai penelitian mutakhir menunjukkan bahwa transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi melalui beberapa mekanisme. Pertama, digitalisasi memungkinkan otomatisasi proses bisnis sehingga mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Kedua, teknologi digital menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap perubahan pasar. Ketiga, transformasi digital memperkuat kemampuan organisasi dalam mengembangkan inovasi produk maupun layanan

yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Keempat, integrasi teknologi digital meningkatkan kolaborasi dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis sehingga memperluas jaringan nilai (value network) organisasi. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menghasilkan efisiensi operasional, tetapi juga menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui peningkatan kapabilitas organisasi.

Dari perspektif teoritis, transformasi digital dapat dijelaskan melalui *Dynamic Capability Theory*, yang menyatakan bahwa organisasi harus mampu mengidentifikasi peluang (*sensing*), memanfaatkan peluang (*seizing*), dan mentransformasikan sumber daya (*transforming*) agar tetap kompetitif dalam lingkungan yang dinamis. Dalam konteks UMKM, kemampuan tersebut tercermin pada kesiapan pelaku usaha untuk mengadopsi teknologi digital, mengembangkan inovasi berbasis teknologi, serta melakukan penyesuaian model bisnis sesuai perubahan kebutuhan pasar. Dengan demikian, transformasi digital bukan merupakan tujuan akhir, melainkan proses pembelajaran organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa transformasi digital merupakan proses perubahan organisasi yang bersifat menyeluruh melalui integrasi teknologi digital, perubahan proses bisnis, pengembangan model bisnis, peningkatan kompetensi sumber daya

manusia, serta penguatan budaya inovasi. Dalam konteks UMKM, transformasi digital menjadi fondasi penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep transformasi digital perlu diawali dengan membedakan istilah *digitization*, dan *digital transformation*, yang akan dibahas pada subbab berikutnya.

Transformasi digital telah berkembang menjadi salah satu faktor strategis yang menentukan keberlangsungan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di era ekonomi digital. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, meningkatnya penetrasi internet, serta perubahan perilaku konsumen telah mengubah lanskap persaingan bisnis secara fundamental. Dalam kondisi tersebut, kemampuan UMKM untuk mengadopsi teknologi digital tidak lagi dipandang sebagai pilihan untuk meningkatkan efisiensi, tetapi telah menjadi kebutuhan agar mampu mempertahankan eksistensi dan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan. Organisasi yang gagal beradaptasi terhadap perubahan teknologi berisiko kehilangan pangsa pasar, mengalami penurunan produktivitas, dan menghadapi kesulitan dalam memenuhi ekspektasi pelanggan yang semakin dinamis (Verhoef et al., 2021).

Salah satu alasan utama yang menjadikan transformasi digital begitu mendesak bagi UMKM adalah perubahan karakteristik konsumen. Konsumen modern cenderung menginginkan proses pencarian informasi, pemesanan, pembayaran, hingga layanan purnajual yang cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses melalui berbagai platform digital. Meningkatnya penggunaan telepon pintar, media sosial, aplikasi perdagangan elektronik, serta sistem pembayaran digital telah mendorong terbentuknya pola konsumsi yang lebih mengutamakan kenyamanan (*convenience*), kecepatan, dan pengalaman pelanggan (*customer experience*). Oleh karena itu, UMKM dituntut untuk membangun kehadiran digital (*digital presence*) melalui pemanfaatan marketplace, media sosial, aplikasi bisnis, maupun platform pembayaran elektronik agar tetap relevan dengan kebutuhan pasar (OECD, 2023).

Selain perubahan perilaku konsumen, urgensi transformasi digital juga dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas persaingan bisnis. Persaingan tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu, tetapi telah berkembang menjadi persaingan global yang memungkinkan konsumen membandingkan produk, harga, dan kualitas layanan hanya melalui perangkat digital. Kondisi tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas, namun sekaligus meningkatkan tekanan kompetitif karena pelaku usaha harus bersaing dengan

perusahaan dari berbagai daerah bahkan negara. Dalam situasi ini, pemanfaatan teknologi digital menjadi instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat respons terhadap perubahan pasar, serta membangun diferensiasi produk dan layanan yang bernilai tambah (World Bank, 2022).

Bagi UMKM, transformasi digital juga memiliki urgensi yang tinggi karena mampu meningkatkan efisiensi operasional. Berbagai aktivitas bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan persediaan, administrasi keuangan, hingga komunikasi dengan pelanggan, kini dapat diotomatisasi melalui aplikasi digital. Otomatisasi tersebut tidak hanya mengurangi kesalahan pencatatan (*human error*), tetapi juga mempercepat proses bisnis, menghemat waktu kerja, dan menurunkan biaya operasional. Dengan meningkatnya efisiensi, pelaku UMKM dapat mengalokasikan sumber daya yang dimiliki untuk kegiatan yang lebih produktif, seperti inovasi produk, pengembangan pasar, maupun peningkatan kualitas layanan. Penelitian Hendrawan et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi transformasi digital berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan efektivitas pengelolaan usaha, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas operasional dan pemasaran.

Urgensi transformasi digital juga berkaitan erat dengan peningkatan kualitas pengambilan keputusan. Pada era ekonomi digital, data telah menjadi salah satu aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi. Melalui pemanfaatan sistem informasi digital, pelaku UMKM dapat memperoleh data mengenai perilaku pelanggan, tren penjualan, efektivitas promosi, hingga kondisi persediaan barang secara real time. Informasi tersebut memungkinkan pemilik usaha mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan berbasis bukti (*evidence based decision making*). Dengan demikian, keputusan mengenai pengembangan produk, strategi pemasaran, pengelolaan stok, maupun perencanaan keuangan tidak lagi hanya didasarkan pada intuisi, tetapi juga pada analisis data yang objektif (de Mattos et al., 2024).

Lebih lanjut, transformasi digital menjadi faktor penting dalam memperluas akses pasar bagi UMKM. Sebelum berkembangnya platform digital, jangkauan pemasaran UMKM umumnya terbatas pada wilayah geografis tertentu dengan biaya promosi yang relatif tinggi. Saat ini, melalui marketplace, media sosial, dan situs web bisnis, UMKM dapat memasarkan produknya kepada konsumen di berbagai daerah bahkan pasar internasional dengan biaya yang relatif lebih rendah. Digitalisasi juga memungkinkan pelaku usaha membangun komunikasi yang lebih intensif dengan pelanggan melalui berbagai saluran digital sehingga mampu meningkatkan loyalitas pelanggan

dan memperkuat citra merek. Oleh karena itu, transformasi digital berperan sebagai katalisator dalam meningkatkan daya saing UMKM di pasar yang semakin terbuka (OECD, 2023).

Dari perspektif manajemen keuangan, transformasi digital memberikan manfaat yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan. Pemanfaatan aplikasi pembukuan digital, sistem pembayaran *elektronik*, dan layanan *financialtechnology* (*FinTech*) memungkinkan UMKM melakukan pencatatan transaksi secara otomatis, memantau arus kas secara berkala, serta menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan tepat waktu. Digitalisasi juga meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan sehingga mempermudah pelaku usaha dalam melakukan evaluasi kinerja maupun memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat tata kelola keuangan UMKM secara keseluruhan (Febriyani et al., 2024).

Urgensi transformasi digital semakin diperkuat oleh meningkatnya ketidakpastian lingkungan bisnis akibat perubahan ekonomi, perkembangan teknologi, maupun dinamika pasar global. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa UMKM yang telah mengadopsi teknologi digital cenderung memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik dibandingkan

usaha yang masih mengandalkan sistem konvensional. Digitalisasi memungkinkan aktivitas pemasaran, transaksi, dan pelayanan pelanggan tetap berlangsung meskipun terdapat pembatasan mobilitas masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat resiliensi organisasi dalam menghadapi berbagai bentuk disrupsi ekonomi dan sosial (Malodia et al., 2023).

Meskipun demikian, urgensi transformasi digital harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta budaya organisasi yang mendukung inovasi. Adopsi teknologi tanpa peningkatan kompetensi digital dan perubahan proses bisnis yang memadai berpotensi mengurangi efektivitas implementasi digitalisasi. Oleh karena itu, transformasi digital perlu dipahami sebagai proses perubahan yang bersifat holistik, mencakup aspek teknologi, organisasi, manusia, dan strategi bisnis. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, sektor swasta, dan pelaku UMKM menjadi faktor penting untuk mempercepat proses transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa transformasi digital merupakan kebutuhan strategis bagi UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi digital. Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas, tetapi juga memperluas akses pasar,

memperbaiki kualitas pengambilan keputusan, memperkuat manajemen keuangan, serta meningkatkan ketahanan usaha terhadap perubahan lingkungan bisnis. Dengan demikian, transformasi digital menjadi fondasi utama dalam menciptakan UMKM yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan implementasi transformasi digital pada UMKM, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi.

B. Konsep Financial Technology (FinTech)

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi yang signifikan dalam industri jasa keuangan. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah *Financial Technology* (FinTech), yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk menciptakan, meningkatkan, dan mengoptimalkan layanan keuangan sehingga menjadi lebih efisien, mudah diakses, cepat, serta berorientasi pada kebutuhan pengguna. Kehadiran FinTech tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan, tetapi juga mengubah model bisnis lembaga keuangan, pola interaksi antara penyedia layanan dan pelanggan, serta mekanisme pengelolaan keuangan pada berbagai skala usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Arner, Barberis, dan Buckley (2016) menjelaskan bahwa perkembangan FinTech merupakan hasil konvergensi antara inovasi

teknologi dan sektor keuangan yang menghasilkan berbagai model layanan keuangan baru berbasis digital. Menurut mereka, FinTech tidak sekadar menghadirkan aplikasi pembayaran elektronik, tetapi mencakup transformasi menyeluruh terhadap sistem keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti komputasi awan (*cloud computing*), *big data analytics*, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi seluler, serta teknologi rantai blok (*blockchain*). Perspektif ini menunjukkan bahwa FinTech merupakan bagian dari proses transformasi digital yang mengubah cara layanan keuangan diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.

Gomber et al. (2018) mendefinisikan FinTech sebagai inovasi berbasis teknologi yang diterapkan pada sektor jasa keuangan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan kualitas layanan. Definisi tersebut menempatkan teknologi sebagai faktor utama dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, FinTech tidak hanya berorientasi pada penggunaan perangkat digital, tetapi juga pada penciptaan nilai (*value creation*) melalui inovasi proses, produk, dan model bisnis.

Dalam konteks UMKM, FinTech berfungsi sebagai instrumen yang memperluas akses terhadap layanan keuangan formal sekaligus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan usaha. Melalui

berbagai aplikasi digital, pelaku UMKM dapat melakukan transaksi secara elektronik, mengelola arus kas, menyusun laporan keuangan, memperoleh pembiayaan, serta memantau kondisi keuangan secara real time. Oleh karena itu, FinTech dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung inklusi keuangan dan penguatan daya saing UMKM di era ekonomi digital (Febriyani et al., 2024).

Perkembangan FinTech berlangsung secara bertahap seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan perubahan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan. Arner et al. (2016) mengelompokkan evolusi FinTech ke dalam tiga fase utama.

Fase pertama, yang dikenal sebagai FinTech 1.0, berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20. Pada periode ini, teknologi mulai dimanfaatkan untuk mendukung infrastruktur sistem keuangan melalui penggunaan telegraf, jaringan komunikasi internasional, mesin ATM, serta sistem pembayaran elektronik sederhana. Fokus utama pada fase ini adalah peningkatan efisiensi operasional lembaga keuangan.

Fase kedua, yaitu FinTech 2.0, berkembang seiring dengan pesatnya penggunaan internet dan digitalisasi sistem perbankan. Pada tahap ini, berbagai layanan seperti internet banking, mobile banking, kartu debit, kartu kredit, dan sistem pembayaran elektronik mulai diadopsi secara luas. Perkembangan tersebut meningkatkan akses

masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mempercepat proses transaksi.

Selanjutnya, FinTech 3.0 ditandai dengan munculnya perusahaan rintisan (startup) yang menawarkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis teknologi digital. Pada fase ini berkembang berbagai layanan seperti dompet digital (e-wallet), peer-to-peer

lending, crowdfunding, payment gateway, buy now pay later (BNPL), robo-advisory, serta layanan investasi digital. Berbeda dengan fase sebelumnya yang didominasi lembaga keuangan konvensional, FinTech 3.0 ditandai oleh kolaborasi maupun kompetisi antara perusahaan teknologi dan institusi keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan FinTech memasuki tahap yang lebih maju melalui integrasi kecerdasan buatan, machine learning, blockchain, Application Programming Interface (API), dan analisis data secara real time. Teknologi tersebut memungkinkan penyedia layanan keuangan memberikan layanan yang lebih personal, aman, dan efisien sesuai karakteristik pengguna. Evolusi ini menunjukkan bahwa FinTech terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan kebutuhan pasar.

FinTech memiliki karakteristik yang membedakannya dari layanan keuangan konvensional. Karakteristik pertama adalah berbasis teknologi digital, di mana seluruh proses layanan memanfaatkan teknologi informasi

sehingga transaksi dapat dilakukan secara cepat dan efisien.

Karakteristik kedua adalah kemudahan akses (*accessibility*). Layanan FinTech dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat digital yang terhubung dengan internet. Hal ini memberikan manfaat yang besar bagi UMKM, terutama yang berada di wilayah dengan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional.

Karakteristik ketiga adalah efisiensi operasional. Digitalisasi proses transaksi mampu mengurangi biaya administrasi, mempercepat penyelesaian transaksi, dan meminimalkan kesalahan akibat proses manual. Efisiensi ini berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pengelolaan sumber daya usaha.

Karakteristik berikutnya adalah berorientasi pada pengguna (*customer centric*). Lee dan Shin (2018) menjelaskan bahwa inovasi FinTech berkembang dengan menempatkan kebutuhan pengguna sebagai fokus utama, sehingga layanan dirancang agar lebih sederhana, fleksibel, dan mudah digunakan. Pendekatan ini meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*) sekaligus memperluas adopsi layanan keuangan digital.

Selain itu, FinTech memiliki karakteristik berbasis data (*data-driven*). Berbagai transaksi yang dilakukan melalui platform digital menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk analisis perilaku pelanggan, penilaian risiko kredit, evaluasi kinerja usaha, hingga pengambilan

keputusan bisnis. Kemampuan mengolah data menjadi informasi yang bernilai menjadikan FinTech sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence based decision making*).

Perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai jenis layanan FinTech dengan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan pengguna. Salah satu jenis yang paling banyak digunakan adalah digital payment, yaitu sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan secara cepat dan aman melalui dompet digital, kode QR, mobile banking, maupun payment gateway. Layanan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung transaksi bisnis UMKM.

Jenis berikutnya adalah *peer-to-peer* (P2P) lending, yaitu platform yang mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana secara digital tanpa melalui mekanisme perbankan konvensional. Bagi UMKM, layanan ini menjadi alternatif pembiayaan, khususnya bagi pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan kredit formal.

Selanjutnya adalah crowdfunding, yaitu mekanisme penghimpunan dana dari banyak pihak melalui platform digital untuk mendukung pengembangan usaha atau proyek tertentu. Model ini memberikan peluang bagi UMKM untuk memperoleh pendanaan sekaligus membangun komunitas pendukung usahanya.

FinTech juga mencakup layanan digital investment dan wealth management, yang

memungkinkan pengguna melakukan investasi, perencanaan keuangan, dan pengelolaan aset secara daring. Selain itu, berkembang pula layanan insurtech yang menghadirkan produk asuransi berbasis digital dengan proses pendaftaran dan klaim yang lebih sederhana.

Perkembangan terbaru memperlihatkan integrasi FinTech dengan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) untuk mendukung analisis risiko, deteksi penipuan (*fraud detection*), penilaian kelayakan kredit, serta pemberian rekomendasi keuangan secara otomatis. Integrasi tersebut menunjukkan bahwa FinTech terus berevolusi menjadi ekosistem layanan keuangan digital yang semakin cerdas dan adaptif.

C. Konsep Marketplace dan Pemasaran Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terbentuknya ekonomi digital (*digital economy*) yang mengubah cara pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnis, membangun hubungan dengan pelanggan, dan menciptakan nilai tambah. Integrasi internet, perangkat seluler, komputasi awan (*cloud computing*), kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan analisis data telah membentuk ekosistem bisnis yang lebih terbuka, cepat, dan terhubung. Dalam ekosistem tersebut, transaksi bisnis tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu, melainkan berlangsung melalui berbagai platform digital yang memungkinkan interaksi antara produsen, distributor, dan konsumen secara real time. Kondisi

ini telah mengubah paradigma pemasaran dari pendekatan konvensional menuju pemasaran digital yang memanfaatkan teknologi sebagai media utama dalam menciptakan, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan (Kotler et al., 2021).

Perubahan tersebut juga memengaruhi perilaku konsumen. Konsumen modern semakin mengandalkan internet dalam mencari informasi produk, membandingkan harga, membaca ulasan pelanggan, hingga melakukan transaksi secara daring. Kemudahan memperoleh informasi menyebabkan konsumen menjadi lebih selektif dalam menentukan produk yang akan dibeli. Selain kualitas produk, konsumen juga mempertimbangkan kecepatan pelayanan, kemudahan transaksi, keamanan pembayaran, serta pengalaman berbelanja secara keseluruhan. Perubahan perilaku ini mendorong pelaku UMKM untuk beradaptasi melalui pemanfaatan marketplace dan strategi digital marketing agar mampu mempertahankan daya saing serta menjangkau pasar yang lebih luas (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2022).

Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam ekonomi digital adalah marketplace, yaitu platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu sistem perdagangan elektronik (*electronic commerce*). Marketplace berfungsi sebagai perantara yang menyediakan infrastruktur digital sehingga proses pencarian produk, promosi,

transaksi, pembayaran, hingga pengiriman barang dapat dilakukan secara terintegrasi. Berbeda dengan toko daring (*online store*) yang dikelola oleh satu perusahaan, marketplace memberikan ruang bagi banyak penjual untuk menawarkan berbagai jenis produk dalam satu platform. Dengan demikian, marketplace menciptakan pasar virtual yang mempertemukan berbagai pelaku usaha dan konsumen secara lebih efisien (Laudon & Traver, 2024).

Keberadaan marketplace memberikan berbagai manfaat bagi UMKM. Pertama, marketplace memperluas jangkauan pasar karena produk dapat dipasarkan kepada konsumen dari berbagai wilayah tanpa harus membuka toko fisik. Kedua, marketplace menurunkan biaya pemasaran dan distribusi karena berbagai fasilitas, seperti katalog produk, sistem pembayaran, layanan logistik, dan promosi digital telah disediakan oleh platform. Ketiga, marketplace meningkatkan transparansi informasi melalui fitur penilaian (*rating*) dan ulasan (*review*) pelanggan sehingga dapat membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Keempat, marketplace menyediakan data transaksi yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mengevaluasi penjualan, mengidentifikasi preferensi pelanggan, serta menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif.

Secara umum, marketplace memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, berbasis

platform digital, sehingga seluruh aktivitas perdagangan dilakukan melalui jaringan internet. Kedua, multi-vendor, yaitu memungkinkan banyak penjual beroperasi dalam satu platform yang sama. Ketiga, terintegrasi, karena menghubungkan sistem pembayaran digital, logistik, komunikasi pelanggan, dan layanan purnajual dalam satu ekosistem. Keempat, berorientasi pada data, di mana setiap transaksi menghasilkan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan bisnis. Karakteristik tersebut menjadikan marketplace sebagai salah satu instrumen penting dalam mendukung transformasi digital UMKM.

Berdasarkan model bisnisnya, marketplace dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk. *Model Business-to-Consumer (B2C)* mempertemukan perusahaan dengan konsumen akhir melalui platform digital. Model ini banyak digunakan oleh perusahaan ritel modern yang menjual produk langsung kepada pelanggan. *Model Business-to-Business (B2B)* memfasilitasi transaksi antara pelaku usaha, misalnya pemasok bahan baku dengan produsen atau distributor. Sementara itu, model *Consumer-to-Consumer (C2C)* memungkinkan individu menjual produk kepada individu lainnya melalui platform digital. Selain ketiga model tersebut, berkembang pula model *Consumer-to-Business (C2B)* yang memungkinkan individu menawarkan jasa atau produk kepada perusahaan, meskipun implementasinya masih relatif terbatas

dibandingkan model lainnya (Laudon & Traver, 2024).

Selain marketplace, perkembangan ekonomi digital juga melahirkan konsep digital marketing, yaitu pendekatan pemasaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pelanggan secara lebih efektif, efisien, dan terukur. Digital marketing tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga menjadi strategi dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui komunikasi yang bersifat interaktif. Kotler, Kartajaya, dan Setiawan (2021) menjelaskan bahwa pemasaran pada era Marketing 5.0 menempatkan teknologi sebagai sarana untuk menciptakan pengalaman pelanggan (*customer experience*) yang lebih personal, adaptif, dan berbasis data. Dengan demikian, digital marketing tidak sekadar memindahkan aktivitas pemasaran ke media digital, tetapi juga mengintegrasikan teknologi dengan pemahaman terhadap perilaku konsumen.

Perkembangan digital marketing berlangsung seiring dengan evolusi teknologi internet. Pada tahap awal, pemasaran digital hanya memanfaatkan situs web sebagai media penyampaian informasi produk. Selanjutnya, perkembangan mesin pencari, media sosial, aplikasi seluler, dan teknologi analitik memungkinkan perusahaan membangun komunikasi dua arah dengan pelanggan serta mengukur efektivitas setiap aktivitas pemasaran secara lebih akurat. Saat ini,

digital marketing berkembang menuju pendekatan berbasis data (*data driven marketing*), yang memanfaatkan kecerdasan buatan, big data, dan otomatisasi pemasaran untuk menghasilkan promosi yang lebih personal sesuai karakteristik konsumen (Ryan, 2021).

Pemasaran Digital memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari pemasaran konvensional. Pertama, interaktif, karena memungkinkan komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan pelanggan. Kedua, terukur, di mana setiap aktivitas pemasaran dapat dievaluasi melalui indikator seperti jumlah kunjungan, tingkat keterlibatan (*engagement*), rasio konversi (*conversion rate*), dan tingkat pengembalian investasi pemasaran (*return on marketing investment*). Ketiga, berorientasi pada data, sehingga strategi pemasaran dapat disusun berdasarkan analisis perilaku pelanggan. Keempat, fleksibel, karena pelaku usaha dapat menyesuaikan konten, target pasar, maupun anggaran promosi sesuai kebutuhan bisnis. Karakteristik tersebut menjadikan digital marketing sebagai pendekatan pemasaran yang lebih efektif dalam menghadapi persaingan bisnis modern (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2022).

Implementasi digital marketing dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang saling melengkapi. *Search Engine Optimization* (SEO) bertujuan meningkatkan visibilitas situs web pada hasil pencarian organik. *Search Engine Marketing* (SEM) memanfaatkan iklan berbayar

untuk meningkatkan lalu lintas kunjungan ke situs web. Content marketing berfokus pada penyediaan konten yang informatif dan bernilai sehingga mampu menarik perhatian pelanggan. Social media marketing memanfaatkan platform media sosial sebagai media promosi dan interaksi dengan konsumen. Selain itu, email marketing digunakan untuk membangun komunikasi yang lebih personal dengan pelanggan, sedangkan video marketing dan live commerce berkembang sebagai strategi yang mampu meningkatkan pengalaman pelanggan melalui penyajian informasi produk secara visual dan interaktif.

Marketplace dan Pemasaran digital merupakan dua komponen yang saling melengkapi dalam mendukung pengembangan UMKM. Marketplace menyediakan infrastruktur digital sebagai tempat berlangsungnya transaksi, sedangkan digital marketing berperan menarik, memengaruhi, dan mempertahankan pelanggan agar melakukan pembelian. Integrasi keduanya memungkinkan UMKM memperluas akses pasar, meningkatkan efektivitas promosi, membangun loyalitas pelanggan, serta meningkatkan penjualan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital UMKM tidak hanya ditentukan oleh kehadiran pada platform marketplace, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam merancang dan mengimplementasikan strategi digital marketing yang sesuai dengan karakteristik pasar sasaran. Dengan memanfaatkan kedua

instrumen tersebut secara terpadu, UMKM memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan daya saing, memperkuat kinerja keuangan, dan mencapai keberlanjutan usaha di era ekonomi digital.

BAB

5

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGUATAN KINERJA UMKM

A. Kebijakan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor strategis dalam perekonomian nasional sehingga memerlukan kebijakan yang mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan. Peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, katalisator, dan pemberdaya melalui penyediaan regulasi, akses pembiayaan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan ekosistem bisnis. Intervensi pemerintah diperlukan karena UMKM umumnya menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan modal, teknologi, akses pasar, kapasitas manajerial, dan inovasi. Oleh karena itu, kebijakan publik diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, serta keberlanjutan UMKM melalui pendekatan yang lebih komprehensif (OECD, 2023).

Menurut OECD (2023), kebijakan pengembangan UMKM modern tidak lagi

berorientasi pada bantuan finansial semata, tetapi menekankan peningkatan produktivitas, inovasi, transformasi digital, penguatan kompetensi sumber daya manusia, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan UMKM bergantung pada kualitas ekosistem yang melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Di Indonesia, kebijakan UMKM didukung oleh kerangka regulasi yang kuat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menjadi dasar pemberdayaan UMKM melalui peningkatan iklim usaha, kewirausahaan, akses pembiayaan, dan kemitraan. Regulasi tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang menekankan penyederhanaan perizinan berbasis risiko, fasilitasi sertifikasi produk, perlindungan usaha, dan perluasan akses pembiayaan. Reformasi tersebut mencerminkan pergeseran kebijakan dari pendekatan berbasis bantuan menuju pembangunan ekosistem usaha yang lebih kompetitif dan berkelanjutan, sejalan dengan rekomendasi World Bank (2023) mengenai pentingnya kualitas institusi dan kepastian regulasi dalam pengembangan UMKM.

Selain aspek regulasi, pemerintah juga memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, peningkatan literasi keuangan, sertifikasi produk,

serta fasilitasi pemasaran. Penelitian Tubastuvi et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi dan inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM karena meningkatkan kemampuan pengelolaan modal kerja, pengambilan keputusan investasi, dan akses terhadap pembiayaan formal. Dengan demikian, kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku usaha memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan modal semata.

Transformasi digital juga menjadi prioritas dalam kebijakan pengembangan UMKM melalui pelatihan pemasaran digital, pemanfaatan platform perdagangan elektronik, sistem pembayaran digital, dan peningkatan literasi digital. Rita dan Nastiti (2024) menemukan bahwa digitalisasi yang terintegrasi dengan manajemen keuangan meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan, dan profitabilitas usaha. Temuan tersebut diperkuat oleh Rosyidiana dan Narsa (2024) yang menunjukkan bahwa digitalisasi, inovasi, dan literasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pembangunan ekosistem kewirausahaan melalui pengembangan inkubator bisnis, kemitraan antara UMKM dan industri, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi. Menurut Harsono dan Rinanda (2025), keberhasilan kebijakan digitalisasi UMKM dipengaruhi oleh collaborative governance, yaitu sinergi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi,

dan masyarakat dalam mempercepat adopsi teknologi dan meningkatkan efektivitas program.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan kapasitas daerah, koordinasi antarinstansi, rendahnya literasi digital, dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan UMKM perlu terus diarahkan pada peningkatan produktivitas, inovasi, transformasi digital, dan penguatan kolaborasi berbasis bukti (*evidence-based policy*) agar UMKM semakin adaptif, berdaya saing, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

B. Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah merupakan instrumen penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan daya saing. Sebagai kelompok usaha yang umumnya memiliki keterbatasan modal, teknologi, akses pasar, serta kompetensi manajerial, UMKM memerlukan dukungan pemerintah agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Dalam perspektif pembangunan ekonomi, bantuan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan bagi pelaku usaha kecil, tetapi juga sebagai investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (OECD, 2023).

Paradigma bantuan pemerintah telah bergeser dari pendekatan berbasis subsidi menuju pendekatan pemberdayaan (empowerment). Fokus kebijakan tidak lagi terbatas pada pemberian bantuan finansial, tetapi diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi, akses terhadap sumber daya produktif, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar. Menurut World Bank (2023), program yang menekankan capacity building memberikan dampak yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan keuangan tanpa diikuti peningkatan kemampuan pelaku usaha.

Di Indonesia, pemberian bantuan kepada UMKM memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan melalui akses pembiayaan, pelatihan, konsultasi usaha, pengembangan kewirausahaan, promosi produk, kemitraan, serta fasilitasi legalitas usaha. Kebijakan ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat sehingga UMKM mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Salah satu bentuk bantuan yang paling banyak dimanfaatkan adalah dukungan pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan penjaminan

kredit. Program tersebut bertujuan memperluas akses modal bagi UMKM yang selama ini menghadapi kendala memperoleh pembiayaan formal. Penelitian Tubastuvi et al. (2024) menunjukkan bahwa akses pembiayaan meningkatkan kapasitas produksi, investasi, dan pengembangan usaha. Namun, efektivitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi keuangan, karena pelaku usaha yang memiliki kemampuan mengelola keuangan cenderung memanfaatkan dana secara lebih produktif.

Selain pembiayaan, pemerintah juga memberikan bantuan dalam bentuk pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, penyusunan laporan keuangan, pemasaran digital, dan pengembangan produk. Rita dan Nastiti (2024) menemukan bahwa peningkatan kompetensi manajemen keuangan yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas UMKM. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pelaku usaha menjadi bagian penting dalam menciptakan kemandirian bisnis.

Transformasi digital juga menjadi fokus utama bantuan pemerintah. Berbagai program, seperti pelatihan pemasaran digital, *onboarding* ke *platform e-commerce*, penggunaan sistem pembayaran digital, dan aplikasi akuntansi, dirancang untuk meningkatkan daya saing UMKM. Rosyidiana dan Narsa (2024) menunjukkan bahwa

digitalisasi, inovasi, dan literasi digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM, terutama pada masa pemulihan ekonomi pascapandemi.

Selain itu, pemerintah memfasilitasi promosi produk melalui pameran, business matching, sertifikasi halal, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan pengembangan merek lokal. Dukungan ini penting karena akses pasar merupakan salah satu faktor utama yang menentukan pertumbuhan dan produktivitas UMKM (OECD, 2023). Pada masa krisis, berbagai program seperti Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan insentif perpajakan juga terbukti membantu menjaga keberlangsungan usaha.

Meskipun demikian, implementasi bantuan masih menghadapi tantangan, antara lain distribusi yang belum merata, keterbatasan basis data UMKM, rendahnya literasi keuangan dan digital, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, World Bank (2023) menekankan pentingnya tata kelola, sistem monitoring, dan evaluasi yang efektif agar bantuan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Ke depan, bantuan pemerintah perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berbasis kebutuhan, dengan mengombinasikan pembiayaan, peningkatan kapasitas, transformasi digital, akses pasar, dan penguatan jejaring bisnis. Pendekatan tersebut akan menghasilkan UMKM

yang lebih mandiri, inovatif, tangguh, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika ekonomi digital.

C. Inkubasi Bisnis

Inkubasi bisnis merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berfokus pada peningkatan kapasitas kewirausahaan, kompetensi manajerial, dan daya saing melalui proses pendampingan yang sistematis. Berbeda dengan bantuan pemerintah yang lebih menekankan penyediaan sumber daya, inkubasi bisnis berorientasi pada pemberdayaan (*capacity building*) melalui pelatihan, konsultasi, akses teknologi, jejaring bisnis, dan pembinaan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, inkubasi bisnis menjadi bagian penting dari ekosistem kewirausahaan yang menghubungkan UMKM dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, investor, dan sektor swasta untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan (OECD, 2023).

Secara konseptual, inkubasi bisnis merupakan proses pembinaan yang dirancang untuk meningkatkan peluang keberhasilan usaha melalui penyediaan fasilitas, pendampingan, pengembangan kompetensi, serta akses terhadap sumber daya produktif. OECD (2023) menjelaskan bahwa program inkubasi yang efektif mampu meningkatkan tingkat keberlangsungan usaha, mempercepat pertumbuhan omzet, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Oleh

karena itu, inkubasi dipandang sebagai strategi jangka panjang yang lebih berkelanjutan dibandingkan bantuan finansial semata.

Dari perspektif *Resource Based View* (RBV), inkubasi bisnis berperan memperkuat sumber daya strategis UMKM, seperti kompetensi kewirausahaan, kemampuan manajerial, inovasi, jejaring bisnis, dan penguasaan teknologi. Barney (1991) menegaskan bahwa keunggulan kompetitif berasal dari kemampuan organisasi mengelola sumber daya yang bernilai, langka, sulit ditiru, dan tidak tergantikan. Melalui proses pendampingan, inkubasi membantu pelaku usaha mengembangkan kapabilitas tersebut sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing secara berkelanjutan.

Di Indonesia, pengembangan inkubasi bisnis didukung oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Pemerintah mendorong pembentukan inkubator bisnis yang dikelola oleh perguruan tinggi, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga penelitian, dan sektor swasta. Program tersebut mencakup pendampingan dalam aspek manajemen usaha, inovasi produk, pemasaran, digitalisasi, legalitas usaha, dan akses pembiayaan.

Salah satu manfaat utama inkubasi adalah peningkatan kapasitas manajerial pelaku usaha. Melalui pendampingan, UMKM memperoleh bimbingan dalam menyusun model bisnis,

mengelola keuangan, melakukan analisis pasar, dan merancang strategi pengembangan usaha. Rita dan Nastiti (2024) menunjukkan bahwa penguatan manajemen keuangan yang dipadukan dengan transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas UMKM. Selain itu, inkubasi juga mempercepat adopsi inovasi dan teknologi melalui akses terhadap hasil penelitian, pelatihan digital, serta penerapan teknologi pada proses produksi dan pemasaran. Rosyidiana dan Narsa (2024) menemukan bahwa digitalisasi dan inovasi berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM.

Selain meningkatkan kompetensi, inkubasi bisnis memperluas jejaring usaha melalui hubungan dengan investor, lembaga pembiayaan, pemasok, dan mitra bisnis. World Bank (2023) menegaskan bahwa jejaring bisnis meningkatkan peluang memperoleh akses pembiayaan, pasar, serta transfer pengetahuan dan teknologi. Inkubator juga membantu meningkatkan literasi keuangan dan kesiapan UMKM memperoleh pembiayaan formal melalui pendampingan penyusunan laporan keuangan, legalitas usaha, dan proposal bisnis. Tubastuvi et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan dan akses pembiayaan memiliki hubungan positif dengan peningkatan kinerja UMKM.

Perkembangan ekonomi digital mendorong transformasi inkubator menjadi pusat pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi.

Program inkubasi kini mencakup pelatihan pemasaran digital, pemanfaatan marketplace, media sosial, sistem pembayaran digital, aplikasi akuntansi, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*). Menurut Harsono dan Rinanda (2025), keberhasilan transformasi digital UMKM memerlukan *collaborative governance* melalui sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi inkubasi bisnis masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan jumlah inkubator, kualitas pendamping, pendanaan operasional, dan koordinasi antarlembaga. Oleh karena itu, OECD (2023) menekankan pentingnya sistem evaluasi, indikator kinerja yang terukur, dan komitmen jangka panjang agar program inkubasi mampu menghasilkan UMKM yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan demikian, inkubasi bisnis perlu diposisikan sebagai strategi pemberdayaan yang memperkuat kapasitas organisasi, inovasi, digitalisasi, dan keberlanjutan UMKM dalam menghadapi persaingan di era ekonomi digital.

Gambar 5 Model Inkubasi Bisnis Terintegrasi bagi UMKM



D. Digitalisasi UMKM

Digitalisasi telah mengubah cara UMKM menjalankan operasional, pemasaran, transaksi, pengelolaan keuangan, hingga pengambilan keputusan. Salah satu bentuk transformasi yang paling nyata adalah pemanfaatan *e-commerce* dan *marketplace* sebagai media pemasaran. Platform digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas tanpa investasi besar untuk toko fisik, sekaligus menyediakan layanan pembayaran, logistik, promosi digital, analisis pelanggan, dan evaluasi penjualan. Menurut OECD (2023), platform digital mampu menurunkan biaya transaksi, meningkatkan efisiensi rantai nilai, dan memperkuat daya saing usaha kecil sehingga marketplace tidak hanya berfungsi sebagai saluran distribusi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengembangan bisnis.

Selain memperluas akses pasar, digitalisasi memperkuat interaksi antara pelaku usaha dan konsumen melalui komunikasi yang lebih cepat, promosi yang lebih efektif, serta pemanfaatan

umpan balik pelanggan untuk pengembangan produk. Integrasi teknologi tersebut membantu UMKM merespons perubahan kebutuhan pasar secara lebih adaptif sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

Financial Technology turut memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. Berbagai layanan, seperti pembayaran digital *mobile banking*, *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, dompet digital, dan aplikasi pencatatan keuangan, mempermudah akses terhadap layanan keuangan formal. Tubastuvi et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan yang didukung pemanfaatan FinTech meningkatkan akses pembiayaan, memperbaiki pengelolaan arus kas, serta mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih efektif.

Integrasi FinTech dengan manajemen keuangan juga meningkatkan kualitas tata kelola usaha. Pencatatan transaksi secara digital menghasilkan informasi yang lebih akurat, transparan, dan mudah dianalisis sehingga memudahkan penyusunan laporan keuangan, pengendalian biaya, serta pemenuhan persyaratan administrasi untuk memperoleh pembiayaan. Rita dan Nastiti (2024) menemukan bahwa transformasi digital yang dipadukan dengan praktik manajemen keuangan yang baik mampu meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas UMKM.

Perkembangan teknologi juga ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan *Artificial Intelligence*

(AI) dalam aktivitas bisnis. Meskipun adopsinya pada UMKM masih terbatas, AI mulai dimanfaatkan untuk analisis perilaku konsumen, prediksi permintaan, pengelolaan persediaan, layanan pelanggan melalui *chatbot*, rekomendasi produk, hingga otomatisasi administrasi. OECD (2023) menegaskan bahwa AI meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi proses, pengurangan kesalahan operasional, dan peningkatan kualitas pelayanan. Selain itu, digitalisasi mendukung penerapan *good business governance* melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengendalian internal berbasis data.

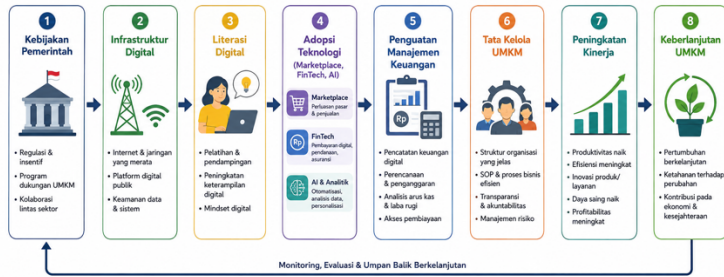
Meskipun menawarkan berbagai manfaat, implementasi digitalisasi masih menghadapi tantangan. Rendahnya literasi digital, keterbatasan kemampuan memanfaatkan aplikasi bisnis, serta kurangnya pemahaman mengenai keamanan informasi menjadi hambatan utama. Rosyidiana dan Narsa (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi dan kemampuan inovasi pelaku usaha. Di sisi lain, kesenjangan infrastruktur digital, terutama di wilayah terpencil, masih membatasi pemerataan adopsi teknologi. World Bank (2023) menekankan bahwa pembangunan infrastruktur digital merupakan prasyarat penting bagi percepatan transformasi ekonomi digital.

Tantangan lain adalah meningkatnya risiko keamanan siber, seperti pencurian data dan penipuan transaksi elektronik. Oleh karena itu,

diperlukan penguatan regulasi perlindungan data, peningkatan literasi keamanan digital, dan penerapan teknologi yang memenuhi standar keamanan informasi. Selain regulasi, percepatan digitalisasi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, dan komunitas bisnis. Harsono dan Rinanda (2025) menjelaskan bahwa pendekatan *collaborative governance* mampu mempercepat adopsi teknologi, memperkuat inovasi, dan memperluas akses UMKM terhadap berbagai sumber daya.

Secara keseluruhan, digitalisasi merupakan proses transformasi multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan adopsi teknologi, tetapi juga perubahan budaya organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola, inovasi model bisnis, dan pengembangan jejaring kolaborasi. Dengan dukungan ekosistem digital yang kuat, digitalisasi menjadi katalisator penting dalam meningkatkan produktivitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM di era ekonomi digital.

Gambar 6 Model Digitalisasi UMKM



E. Pembiayaan UMKM

Pembiayaan merupakan faktor fundamental yang menentukan keberlangsungan dan pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketersediaan modal memungkinkan pelaku usaha meningkatkan kapasitas produksi, melakukan investasi teknologi, mengembangkan inovasi, serta memperluas pemasaran. Sebaliknya, keterbatasan akses pembiayaan menjadi salah satu hambatan utama yang menyebabkan rendahnya produktivitas dan daya saing UMKM. Oleh karena itu, pembiayaan tidak hanya dipandang sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong efisiensi, inovasi, dan keberlanjutan usaha.

Dalam perspektif keuangan, Pecking Order Theory menjelaskan bahwa pelaku usaha cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu, kemudian memanfaatkan pembiayaan eksternal, dan terakhir menerbitkan kepemilikan baru apabila diperlukan (Myers & Majluf, 1984). Pola ini banyak ditemukan pada UMKM di Indonesia, yang masih mengandalkan modal pribadi atau keluarga karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan

formal. Menurut World Bank (2023), sebagian besar UMKM di negara berkembang mengalami financing gap, yaitu kesenjangan antara kebutuhan modal dan kemampuan memperoleh pembiayaan formal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh rendahnya literasi keuangan, keterbatasan agunan, belum memadainya laporan keuangan, serta tingginya persepsi risiko dari lembaga pembiayaan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Indonesia menyediakan berbagai skema pembiayaan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Kebijakan tersebut mendukung pengembangan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan Ultra Mikro (UMi), penjaminan kredit, pembiayaan syariah, dan berbagai fasilitas lainnya guna memperluas akses modal bagi UMKM. Program-program tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pembiayaan yang lebih inklusif.

Efektivitas pembiayaan sangat dipengaruhi oleh literasi dan manajemen keuangan pelaku usaha. Tubastuvi et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan, inklusi keuangan, dan akses pembiayaan formal berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja UMKM karena membantu pelaku usaha mengelola modal kerja, menyusun anggaran, dan mengambil keputusan investasi secara lebih tepat. Rita dan Nastiti (2024) juga

menemukan bahwa integrasi manajemen keuangan dengan transformasi digital meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas melalui pemanfaatan aplikasi akuntansi digital serta sistem pencatatan keuangan yang lebih akurat.

Financial Technology (FinTech) semakin memperluas akses pembiayaan bagi UMKM melalui layanan seperti *peer-to-peer lending*, *crowdfunding*, pembayaran digital, dompet elektronik, dan analisis kredit berbasis teknologi. OECD (2023) menyatakan bahwa digitalisasi sektor keuangan meningkatkan inklusi keuangan dengan menyederhanakan proses pengajuan pembiayaan, mempercepat analisis kredit, dan menurunkan biaya transaksi. Namun, pemanfaatan pembiayaan digital harus diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko, kemampuan pembayaran kembali, dan pengelolaan utang agar tidak menimbulkan masalah keuangan.

Selain itu, akses terhadap pembiayaan formal juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola usaha. Lembaga keuangan umumnya mensyaratkan legalitas usaha, laporan keuangan yang andal, kepatuhan perpajakan, dan transparansi pengelolaan bisnis. World Bank (2023) menegaskan bahwa tata kelola yang baik meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan dan memperluas peluang UMKM memperoleh modal.

Di sisi lain, pembiayaan syariah melalui skema *murābahah*, *musyārakah*, *muḍārabah*, dan *ijārah* memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah dan semakin berkembang dalam

mendukung UMKM, khususnya pada sektor usaha halal.

Meskipun berbagai skema pembiayaan telah tersedia, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan dan digital, keterbatasan administrasi, serta kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih perlu diatasi. Oleh karena itu, pengembangan sistem pembiayaan UMKM harus dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan literasi keuangan, digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

BAB

6

Praktik Manajemen Keuangan UMKM di Sulawesi Barat

A. Dinamika Perkembangan UMKM di Sulawesi Barat

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang memiliki peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi

daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Di Provinsi Sulawesi Barat, perkembangan UMKM terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah pelaku usaha yang bergerak pada sektor perdagangan, pertanian, perikanan, industri rumah tangga, kuliner, jasa, dan ekonomi kreatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa UMKM telah menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi daerah sekaligus menjadi instrumen penting dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Karakteristik UMKM di Sulawesi Barat pada umumnya masih didominasi oleh usaha mikro dan usaha kecil yang dikelola secara mandiri oleh keluarga. Sebagian besar pelaku usaha memanfaatkan sumber daya lokal sebagai bahan baku utama, seperti hasil pertanian, perikanan, perkebunan, serta berbagai produk olahan pangan. Model usaha tersebut memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan nilai tambah komoditas lokal, namun di sisi lain masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam aspek manajemen usaha, akses

pembiayaan, penguasaan teknologi, serta perluasan pasar.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa sektor perdagangan, industri pengolahan, pertanian, serta penyediaan akomodasi dan makanan-minuman merupakan sektor yang terus mengalami pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut memberikan peluang yang besar bagi pengembangan UMKM apabila didukung oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya secara efektif. Dengan demikian, peningkatan kapasitas manajerial, khususnya dalam bidang manajemen keuangan, menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan usaha.

Dalam perspektif *Resource-Based View* (RBV), kemampuan mengelola sumber daya internal merupakan dasar terciptanya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Barney (1991) menjelaskan bahwa organisasi yang mampu mengelola sumber daya secara efektif akan memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam mempertahankan daya saing dibandingkan organisasi yang hanya mengandalkan kepemilikan

aset. Pada konteks UMKM, kemampuan tersebut tercermin melalui pengelolaan keuangan, pemanfaatan teknologi, kualitas sumber daya manusia, inovasi produk, serta kemampuan membangun jejaring usaha.

Perkembangan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif menuntut pelaku UMKM di Sulawesi Barat untuk tidak hanya mengandalkan pengalaman usaha, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Pengambilan keputusan berbasis informasi keuangan, penggunaan teknologi digital, serta kemampuan melakukan perencanaan usaha menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan apabila UMKM ingin meningkatkan produktivitas dan memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, praktik manajemen keuangan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen strategis dalam membangun keberlanjutan usaha.

Selain faktor internal, perkembangan UMKM di Sulawesi Barat juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah, ketersediaan lembaga pendamping usaha, akses terhadap lembaga keuangan, serta meningkatnya penggunaan

teknologi digital. Berbagai program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, digitalisasi UMKM, serta penguatan akses pemasaran telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kapasitas pelaku usaha. Namun demikian, efektivitas program tersebut masih sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara profesional.

Berdasarkan kondisi tersebut, praktik manajemen keuangan menjadi salah satu aspek yang paling menentukan dalam membentuk kinerja UMKM di Sulawesi Barat. Pengelolaan keuangan yang baik memungkinkan pelaku usaha menyusun perencanaan bisnis yang lebih terarah, mengendalikan biaya operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan modal, serta mengurangi risiko kegagalan usaha. Oleh sebab itu, pembahasan pada bab ini difokuskan pada bagaimana praktik manajemen keuangan diterapkan oleh pelaku UMKM di Sulawesi Barat serta bagaimana praktik tersebut berkontribusi terhadap peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha.

B. Praktik Pengelolaan Keuangan pada UMKM di Sulawesi Barat

Manajemen keuangan merupakan salah satu fondasi utama yang menentukan keberhasilan suatu usaha dalam mempertahankan keberlangsungan bisnis, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Pada konteks Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelolaan keuangan tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pencatatan transaksi, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi terhadap seluruh aktivitas keuangan yang mendukung pencapaian tujuan usaha. Pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan pelaku UMKM memanfaatkan sumber daya secara efisien sehingga mampu menghadapi dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kemampuan mengelola keuangan merupakan salah satu determinan utama yang membedakan UMKM yang mampu berkembang secara berkelanjutan dengan UMKM yang mengalami stagnasi atau bahkan berhenti beroperasi.

Di Provinsi Sulawesi Barat, praktik pengelolaan keuangan pada UMKM masih menunjukkan karakteristik yang beragam. Sebagian besar usaha mikro masih dikelola secara sederhana dengan mengandalkan pengalaman pemilik usaha tanpa didukung oleh sistem administrasi keuangan yang memadai. Kondisi tersebut merupakan karakteristik umum UMKM di berbagai daerah berkembang, di mana aktivitas usaha masih sangat bergantung pada kemampuan individu pemilik usaha dalam mengambil keputusan. Akibatnya, banyak keputusan bisnis dilakukan berdasarkan intuisi dan pengalaman praktis dibandingkan informasi keuangan yang disusun secara sistematis.

Salah satu praktik yang masih sering ditemukan adalah belum adanya pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Pendapatan usaha sering kali digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan keluarga tanpa melalui proses pencatatan yang jelas. Sebaliknya, kebutuhan rumah tangga juga kerap dibiayai menggunakan modal usaha. Praktik tersebut menyebabkan pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan yang

sebenarnya, sehingga sulit menentukan tingkat keuntungan, besarnya modal yang masih tersedia, maupun kemampuan usaha dalam menghasilkan arus kas yang sehat. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kemampuan UMKM untuk berkembang karena keputusan investasi dan pembiayaan dilakukan tanpa informasi keuangan yang akurat.

Selain pemisahan keuangan, pencatatan transaksi juga menjadi tantangan utama. Banyak pelaku UMKM hanya mencatat transaksi tertentu atau bahkan mengandalkan ingatan dalam menghitung pendapatan dan pengeluaran. Padahal, pencatatan keuangan merupakan instrumen dasar dalam menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja usaha. Melalui pencatatan yang baik, pelaku usaha dapat mengetahui perkembangan penjualan, biaya operasional, keuntungan, serta kebutuhan modal kerja. Informasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi pengembangan usaha maupun dalam memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Dalam perspektif manajemen modern, pencatatan keuangan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan strategis. Informasi keuangan yang akurat memungkinkan pelaku UMKM melakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan sumber daya, mengidentifikasi aktivitas yang menimbulkan biaya tinggi, serta menentukan prioritas investasi yang memberikan nilai tambah paling besar. Oleh karena itu, penguatan sistem pencatatan keuangan menjadi salah satu langkah awal dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan UMKM.

Praktik lain yang masih menjadi perhatian adalah pengelolaan arus kas (*cash flow*). Banyak UMKM memperoleh keuntungan secara akuntansi, namun mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek karena pengelolaan kas yang kurang baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa keuntungan tidak selalu identik dengan ketersediaan kas. Ketika penerimaan kas tidak seimbang dengan pengeluaran operasional, usaha berpotensi mengalami gangguan likuiditas meskipun penjualan terus meningkat. Oleh sebab

itu, pengelolaan arus kas harus menjadi prioritas dalam manajemen keuangan UMKM.

Pengendalian biaya operasional juga menjadi aspek yang sangat menentukan keberlanjutan usaha. Pelaku UMKM sering menghadapi peningkatan harga bahan baku, biaya distribusi, biaya energi, dan biaya tenaga kerja. Tanpa sistem pengendalian biaya yang baik, peningkatan penjualan belum tentu menghasilkan peningkatan keuntungan. Oleh karena itu, setiap pengeluaran perlu dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap penciptaan nilai tambah usaha. Pendekatan tersebut memungkinkan UMKM meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas produk maupun pelayanan kepada konsumen.

Perencanaan keuangan merupakan praktik berikutnya yang semakin penting dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Perencanaan keuangan memberikan arah bagi pelaku usaha dalam mengalokasikan modal, menentukan kebutuhan investasi, memperkirakan arus kas, serta mengantisipasi berbagai risiko usaha. UMKM yang memiliki perencanaan keuangan cenderung lebih siap menghadapi fluktuasi

permintaan pasar, perubahan harga bahan baku, maupun kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sebaliknya, usaha yang tidak memiliki perencanaan sering mengalami kesulitan ketika menghadapi penurunan penjualan atau kebutuhan modal mendadak.

Perkembangan teknologi digital turut mengubah praktik pengelolaan keuangan UMKM. Berbagai aplikasi pencatatan keuangan, sistem pembayaran digital, layanan perbankan elektronik, serta platform akuntansi berbasis komputasi awan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menyusun laporan keuangan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi juga mempercepat proses transaksi serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual. Berbagai studi menunjukkan bahwa transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperbaiki kualitas informasi keuangan yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks UMKM di Sulawesi Barat, adopsi teknologi keuangan mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Semakin banyak pelaku usaha memanfaatkan layanan pembayaran digital

seperti QRIS, mobile banking, dompet digital, maupun aplikasi pembukuan sederhana. Walaupun tingkat pemanfaatannya belum merata, perubahan ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya digitalisasi dalam mendukung efisiensi bisnis. Penggunaan teknologi tersebut tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga mempermudah proses pencatatan, penyusunan laporan keuangan, dan pengendalian arus kas.

**Tabel 1 Ringkasan Temuan Manajemen Keuangan
UMKM di Sulawesi Barat**

No	Aspek Manajemen Keuangan	Temuan Kajian Empiris	Implikasi terhadap Kinerja UMKM
1	Pencatatan transaksi	Sebagian besar UMKM telah melakukan pencatatan sederhana, namun belum seluruhnya menggunakan sistem pembukuan yang terstruktur.	Menyulitkan pelaku usaha dalam mengevaluasi laba, arus kas, dan perkembangan usaha.
2	Pemisahan keuangan	Masih ditemukan pelaku usaha	Pengendalian modal kerja menjadi kurang

	usaha dan pribadi	yang mencampurkan keuangan usaha dengan kebutuhan rumah tangga.	efektif dan berpotensi mengganggu
3	Penyusunan anggaran usaha	Anggaran usaha belum disusun secara rutin oleh sebagian besar UMKM.	Perencanaan investasi dan pengendalian biaya menjadi kurang optimal.
4	Pengelolaan arus kas	Pelaku usaha yang memantau arus kas secara berkala memiliki kondisi usaha yang lebih stabil	Arus kas yang sehat meningkatkan kemampuan memenuhi kewajiban usaha dan memperkuat keberlanjutan bisnis.
5	Pengendalian biaya	Pengusaha yang melakukan evaluasi biaya operasional mampu meningkatkan efisiensi usaha.	Efisiensi biaya meningkatkan keuntungan dan daya saing usaha.

Sumber: Sintesis hasil kajian empiris penulis (2026).

Temuan empiris yang menjadi dasar penyusunan buku ini memperlihatkan bahwa

pelaku UMKM yang menerapkan praktik manajemen keuangan secara lebih sistematis cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengembangkan usahanya. Kemampuan menyusun pencatatan keuangan, mengendalikan biaya operasional, mengelola modal kerja, serta melakukan evaluasi terhadap kondisi keuangan usaha memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan produktivitas dan keberlanjutan usaha. Kondisi tersebut memperkuat pandangan bahwa manajemen keuangan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan sumber daya strategis yang menciptakan keunggulan kompetitif sebagaimana dijelaskan dalam teori Resource-Based View (RBV).

Dengan demikian, praktik manajemen keuangan pada UMKM di Sulawesi Barat menunjukkan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki, tetapi lebih ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola modal tersebut secara efektif, efisien, dan berorientasi pada keberlanjutan. Penguatan kapasitas manajerial, peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta dukungan kebijakan

pemerintah menjadi faktor yang saling melengkapi dalam membangun UMKM yang tangguh, adaptif, inovatif, dan mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional.

C. Transformasi Digital dalam Praktik Manajemen Keuangan UMKM

Transformasi digital telah mengubah paradigma pengelolaan usaha dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi yang lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi proses pemasaran dan pelayanan pelanggan, tetapi juga membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik manajemen keuangan UMKM. Digitalisasi memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi keuangan secara real-time, melakukan transaksi secara elektronik, mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan efisiensi proses bisnis. Oleh karena itu, kemampuan memanfaatkan teknologi digital telah menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan daya saing UMKM di era ekonomi digital.

Bagi UMKM di Sulawesi Barat, transformasi digital masih berada pada tahap perkembangan.

Sebagian pelaku usaha telah memanfaatkan berbagai aplikasi digital, seperti layanan pembayaran non-tunai, aplikasi pembukuan digital, marketplace, media sosial, serta layanan perbankan elektronik. Namun demikian, sebagian lainnya masih mengelola keuangan secara manual akibat keterbatasan literasi digital, rendahnya akses terhadap teknologi, maupun keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital belum berlangsung secara merata sehingga diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan kapasitas digital pelaku UMKM.

Penggunaan aplikasi pembukuan digital merupakan salah satu bentuk transformasi yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Berbagai aplikasi memungkinkan pelaku usaha mencatat transaksi secara otomatis, menyusun laporan laba rugi, memonitor arus kas, mengelola piutang dan utang, serta menghasilkan laporan keuangan secara cepat. Dibandingkan pencatatan manual, sistem digital mampu meminimalkan kesalahan pencatatan dan meningkatkan akurasi informasi yang digunakan

sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, data keuangan yang tersimpan secara digital lebih mudah diakses kembali sehingga mempermudah proses evaluasi usaha.

Pemanfaatan sistem pembayaran digital juga memberikan kontribusi penting terhadap efisiensi operasional UMKM. Kehadiran QRIS, mobile banking, internet banking, dompet digital, dan berbagai platform pembayaran elektronik telah mempercepat proses transaksi sekaligus meningkatkan kenyamanan konsumen. Dari sisi pelaku usaha, transaksi digital menghasilkan riwayat pembayaran yang terdokumentasi secara otomatis sehingga mempermudah proses pencatatan keuangan dan pengawasan arus kas. Semakin banyak transaksi yang tercatat secara digital, semakin baik pula kualitas informasi keuangan yang dimiliki oleh pelaku usaha.

Transformasi digital juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas akses terhadap lembaga keuangan formal. Saat ini, berbagai lembaga perbankan maupun perusahaan teknologi finansial (fintech) mulai memanfaatkan data transaksi digital sebagai salah satu dasar dalam

melakukan penilaian kelayakan pembiayaan. Dengan demikian, pelaku UMKM yang memiliki pencatatan transaksi yang baik melalui sistem digital cenderung memiliki peluang yang lebih besar dalam memperoleh akses pembiayaan dibandingkan usaha yang belum memiliki administrasi keuangan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat inklusi keuangan bagi pelaku UMKM.

Tabel 2 Ringkasan Temuan Pemanfaatan Teknologi pada UMKM

No	Aspek Teknologi	Temuan Kajian Empiris	Dampak terhadap Kinerja UMKM
1	Pembayaran digital	Penggunaan QRIS dan mobile banking mulai meningkat pada sebagian UMKM.	Mempercepat transaksi dan meningkatkan kenyamanan pelanggan.
2	Pembukuan digital	Sebagian pelaku usaha telah menggunakan aplikasi pencatatan keuangan sederhana.	Meningkatkan akurasi pencatatan dan mempermudah penyusunan laporan keuangan.
3	Media sosial	Media sosial menjadi sarana	Memperluas jangkauan pasar

		promosi yang paling banyak dimanfaatkan.	dan meningkatkan penjualan.
4	Marketplace	Penggunaan marketplace mulai berkembang, terutama pada UMKM kuliner dan produk olahan.	Membuka akses pasar di luar wilayah Sulawesi Barat.
5	Literasi digital	Tingkat pemahaman teknologi masih bervariasi antar pelaku usaha.	Literasi digital yang baik mendorong peningkatan efisiensi operasional dan inovasi usaha.

Sumber: Sintesis hasil kajian empiris penulis (2026).

Hasil kajian empiris dalam buku ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki tingkat pemahaman teknologi yang lebih baik cenderung menerapkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih sistematis. Mereka lebih mudah melakukan pencatatan transaksi, menyusun laporan keuangan, mengendalikan pengeluaran, serta mengevaluasi perkembangan usaha secara berkala. Sebaliknya, pelaku usaha dengan kemampuan digital yang rendah masih menghadapi berbagai kendala dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat pendukung pengambilan keputusan

bisnis. Temuan ini memperlihatkan bahwa literasi digital dan manajemen keuangan merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam meningkatkan kinerja UMKM.

Dalam perspektif *Technology-Organization-Environment* (TOE) Framework, keberhasilan adopsi teknologi dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, kesiapan organisasi, dan dukungan lingkungan eksternal. Artinya, transformasi digital tidak hanya bergantung pada tersedianya perangkat teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan sumber daya manusia, komitmen pemilik usaha, serta dukungan kebijakan pemerintah dan ekosistem bisnis. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, serta penyediaan infrastruktur digital yang memadai.

Transformasi digital juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Melalui sistem digital, seluruh transaksi dapat didokumentasikan secara sistematis sehingga memudahkan proses audit internal maupun evaluasi kinerja usaha. Transparansi tersebut menjadi salah satu faktor

penting dalam meningkatkan kepercayaan investor, lembaga keuangan, maupun mitra bisnis. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya memberikan manfaat operasional, tetapi juga meningkatkan kredibilitas UMKM dalam menjalin hubungan bisnis yang lebih luas.

Secara keseluruhan, transformasi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik manajemen keuangan UMKM modern. Penggunaan teknologi digital memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas informasi keuangan, serta kemampuan bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, penguatan literasi digital perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang yang akan menentukan keberlanjutan UMKM di masa mendatang.

D. Peran Pemerintah dalam Memperkuat Praktik Manajemen Keuangan UMKM

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM. Sebagai sektor yang menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional dan memberikan kontribusi signifikan terhadap

perekonomian daerah, UMKM memerlukan dukungan kebijakan yang mampu meningkatkan kapasitas manajerial, memperluas akses pembiayaan, mempercepat transformasi digital, serta meningkatkan daya saing produk. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator, katalisator, dan mitra pengembangan usaha.

Berbagai kebijakan pemerintah telah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan UMKM melalui penyediaan akses pembiayaan, program pelatihan, pendampingan bisnis, digitalisasi usaha, serta penguatan literasi keuangan. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pelatihan kewirausahaan, fasilitasi sertifikasi produk, digitalisasi UMKM, hingga pembentukan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) merupakan bentuk intervensi yang bertujuan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola usaha secara profesional.

Di Sulawesi Barat, berbagai program pemberdayaan telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan kementerian,

perguruan tinggi, lembaga keuangan, Bank Indonesia, serta pelaku industri. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari pendekatan collaborative governance yang menempatkan seluruh pemangku kepentingan sebagai mitra dalam memperkuat ekosistem UMKM. Pendekatan ini penting karena pengembangan UMKM tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan membutuhkan sinergi antara akademisi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Tabel 3 Ringkasan Temuan Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

No	Bentuk Dukungan Pemerintah	Temuan Kajian Empiris	Kontribusi terhadap UMKM
1	Pelatihan kewirausahaan	Pelaku usaha memperoleh peningkatan pengetahuan mengenai pengelolaan usaha.	Meningkatkan kompetensi manajerial pelaku UMKM.
2	Pelatihan manajemen keuangan	Meningkatkan kemampuan menyusun pencatatan dan laporan keuangan.	Memperbaiki kualitas pengambilan keputusan usaha.

3	Digitalisasi UMKM	Pemerintah mendorong penggunaan QRIS, pemasaran digital, dan aplikasi usaha.	Mempercepat transformasi digital UMKM.
4	Akses pembiayaan	Program KUR dan pembiayaan lainnya mulai dimanfaatkan oleh sebagian pelaku usaha.	Memperkuat modal usaha untuk pengembangan bisnis.
5	Pendampingan usaha	Pendampingan dilakukan melalui dinas, PLUT, perguruan tinggi, dan mitra lainnya.	Membantu UMKM meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha.

Sumber: Sintesis hasil kajian empiris penulis (2026).

Hasil kajian dalam buku ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan praktik manajemen keuangan UMKM, terutama melalui peningkatan literasi keuangan, akses terhadap pembiayaan formal, serta pendampingan dalam penyusunan administrasi usaha. Pelaku usaha yang memperoleh pelatihan dan pendampingan cenderung lebih memahami pentingnya pencatatan keuangan, penyusunan

anggaran, pengelolaan modal kerja, serta penggunaan teknologi digital dalam mendukung aktivitas bisnis.

Meskipun demikian, efektivitas program pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan jangkauan program, rendahnya tingkat partisipasi sebagian pelaku UMKM, serta belum meratanya akses terhadap teknologi dan informasi di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih berkelanjutan melalui pendampingan intensif, evaluasi berkala, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta.

Secara keseluruhan, keberhasilan penguatan manajemen keuangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan internal pelaku usaha, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas kebijakan publik yang mendukung terciptanya lingkungan usaha yang produktif. Pemerintah berperan sebagai penggerak utama dalam membangun ekosistem yang memungkinkan UMKM berkembang secara berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan, serta

mampu bersaing pada tingkat nasional maupun global.

E. Sintesis Kajian Empiris tentang Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja UMKM di Sulawesi Barat

1. Manajemen Keuangan sebagai Fondasi Peningkatan Kinerja UMKM

Keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif. Dalam praktik bisnis modern, manajemen keuangan dipandang sebagai sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan evaluasi penggunaan dana untuk mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan. Bagi UMKM, fungsi tersebut menjadi semakin penting karena sebagian besar pelaku usaha beroperasi dengan keterbatasan modal, sumber daya manusia, serta akses terhadap informasi keuangan.

Kajian empiris yang menjadi dasar penyusunan buku ini menunjukkan bahwa praktik manajemen keuangan memiliki

kontribusi yang sangat besar terhadap peningkatan kinerja UMKM di Sulawesi Barat. Pelaku usaha yang secara konsisten melakukan pencatatan transaksi, menyusun anggaran usaha, mengendalikan biaya operasional, serta mengevaluasi kondisi keuangan secara berkala cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mempertahankan stabilitas usaha dibandingkan pelaku usaha yang belum menerapkan pengelolaan keuangan secara sistematis.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa manajemen keuangan bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam menciptakan efisiensi operasional dan meningkatkan produktivitas usaha. Informasi keuangan yang akurat memungkinkan pelaku usaha mengetahui kondisi usaha secara objektif sehingga keputusan yang diambil lebih rasional, terukur, dan mampu meminimalkan risiko bisnis. Sebaliknya, keputusan yang hanya didasarkan pada intuisi sering kali mengakibatkan penggunaan modal yang tidak efisien,

meningkatnya biaya operasional, dan rendahnya kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan.

Temuan tersebut sejalan dengan pandangan *Resource-Based View* (RBV) yang dikemukakan oleh Barney (1991), yang menjelaskan bahwa keunggulan kompetitif organisasi berasal dari kemampuan mengelola sumber daya internal secara efektif. Dalam konteks UMKM, sistem manajemen keuangan merupakan salah satu sumber daya strategis yang sulit ditiru oleh pesaing karena berkaitan dengan kompetensi organisasi dalam menghasilkan informasi yang berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan.

Hasil penelitian OECD (2023) juga menunjukkan bahwa UMKM yang menerapkan pengelolaan keuangan secara profesional memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan usaha yang masih menggunakan sistem pencatatan sederhana. Kondisi tersebut diperkuat oleh World Bank (2024), yang menyatakan bahwa kualitas manajemen keuangan berhubungan langsung dengan

kemampuan UMKM memperoleh akses pembiayaan formal, meningkatkan efisiensi penggunaan modal, serta memperluas skala usaha.

Di Sulawesi Barat, praktik tersebut mulai terlihat pada UMKM yang telah melakukan pemisahan antara keuangan usaha dan keuangan rumah tangga. Pemisahan tersebut memberikan kemudahan dalam menghitung keuntungan usaha, menentukan kebutuhan modal kerja, mengevaluasi efisiensi biaya, serta menyusun strategi pengembangan usaha. Walaupun masih banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan praktik tersebut secara optimal, kecenderungan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya pengelolaan keuangan menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pengelolaan usaha yang bersifat tradisional menuju pengelolaan usaha yang lebih profesional.

Selain itu, kemampuan menyusun laporan keuangan sederhana juga memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan kredibilitas UMKM di hadapan lembaga

keuangan. Perbankan dan lembaga pembiayaan umumnya memerlukan informasi keuangan sebagai dasar penilaian kelayakan usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha yang memiliki administrasi keuangan yang baik cenderung memperoleh peluang yang lebih besar dalam mengakses pembiayaan dibandingkan pelaku usaha yang belum memiliki sistem pencatatan yang memadai.

Secara keseluruhan, sintesis kajian empiris menunjukkan bahwa penguatan manajemen keuangan merupakan strategi utama dalam meningkatkan daya saing UMKM. Pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat kemampuan usaha dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis, memperluas akses pembiayaan, serta menciptakan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

2. Pemahaman Teknologi sebagai Penggerak Efisiensi dan Daya Saing UMKM

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang mendasar terhadap cara organisasi menjalankan aktivitas bisnis.

Transformasi digital memungkinkan berbagai proses usaha dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Dalam konteks UMKM, pemanfaatan teknologi tidak lagi terbatas pada aktivitas promosi melalui media sosial, tetapi telah berkembang menjadi instrumen penting dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, pelayanan pelanggan, pengendalian persediaan, hingga pengambilan keputusan strategis.

Kajian empiris dalam buku ini memperlihatkan bahwa tingkat pemahaman teknologi berhubungan erat dengan peningkatan kualitas pengelolaan usaha. Pelaku UMKM yang mampu memanfaatkan aplikasi pembukuan digital, sistem pembayaran elektronik, layanan perbankan digital, serta platform pemasaran daring menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam meningkatkan efisiensi operasional dibandingkan pelaku usaha yang masih mengandalkan sistem konvensional.

Pemanfaatan teknologi memungkinkan proses pencatatan transaksi dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi risiko kesalahan

administrasi. Selain itu, informasi keuangan dapat diperoleh secara real-time sehingga mempermudah proses evaluasi usaha. Kemampuan tersebut menjadi semakin penting karena lingkungan bisnis saat ini menuntut kecepatan dalam mengambil keputusan serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen.

Dalam perspektif *Technology Organization Environment* (TOE) Framework, keberhasilan adopsi teknologi dipengaruhi oleh kesiapan teknologi, kesiapan organisasi, dan dukungan lingkungan eksternal. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan organisasi dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam seluruh proses bisnis.

Temuan ini konsisten dengan berbagai penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan produktivitas UMKM melalui efisiensi biaya transaksi, peningkatan kualitas informasi, serta perluasan akses pasar. Dengan demikian, pemahaman

teknologi merupakan aset strategis yang mendukung peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha.

3. Peran Pemerintah dalam Memperkuat Kinerja UMKM

Perkembangan UMKM tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan internal pelaku usaha, tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan eksternal yang mendukung aktivitas bisnis. Salah satu aktor yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan tersebut adalah pemerintah. Melalui kebijakan, regulasi, program pemberdayaan, penyediaan akses pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan infrastruktur digital, pemerintah menjadi katalisator yang mampu mempercepat pertumbuhan dan daya saing UMKM.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi daerah, keberadaan pemerintah tidak hanya sebagai regulator yang menyusun kebijakan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai layanan pendukung bagi pelaku usaha. Pendekatan ini menjadi semakin penting karena

sebagian besar UMKM masih menghadapi keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan, lemahnya penguasaan teknologi, serta terbatasnya akses terhadap pasar dan lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diarahkan untuk mengurangi berbagai hambatan tersebut melalui program-program yang bersifat edukatif, fasilitatif, dan kolaboratif.

Kajian empiris dalam buku ini memperlihatkan bahwa dukungan pemerintah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kapasitas manajemen UMKM di Sulawesi Barat. Pelaku usaha yang memperoleh pendampingan, pelatihan, maupun akses terhadap program pemberdayaan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menyusun administrasi usaha, melakukan pencatatan keuangan, memanfaatkan teknologi digital, serta mengembangkan strategi pemasaran. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mampu meningkatkan kualitas pengelolaan usaha apabila diikuti dengan partisipasi aktif dari pelaku UMKM.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah yang paling dirasakan adalah penyediaan akses pembiayaan melalui berbagai skema kredit bagi UMKM. Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah membantu banyak pelaku usaha memperoleh tambahan modal dengan persyaratan yang lebih ringan dibandingkan pembiayaan komersial. Akses terhadap pembiayaan tersebut memungkinkan UMKM meningkatkan kapasitas produksi, memperluas usaha, memperbaiki kualitas produk, serta melakukan investasi pada teknologi yang lebih modern. Namun demikian, keberhasilan pemanfaatan pembiayaan sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam mengelola dana secara produktif. Modal yang besar tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak didukung oleh sistem manajemen keuangan yang baik.

Selain pembiayaan, pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kompetensi pelaku usaha melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan. Materi pelatihan umumnya meliputi pengelolaan keuangan,

penyusunan laporan keuangan sederhana, strategi pemasaran digital, pengembangan produk, pengurusan legalitas usaha, hingga peningkatan kualitas pelayanan. Program tersebut memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh pengetahuan baru yang sebelumnya belum dimiliki. Dalam jangka panjang, peningkatan kompetensi tersebut menjadi modal penting dalam membangun usaha yang lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Perkembangan ekonomi digital juga mendorong pemerintah untuk mempercepat digitalisasi UMKM melalui berbagai kebijakan strategis. Dukungan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan pemasaran digital, fasilitasi penggunaan QRIS, pendampingan pemanfaatan marketplace, serta pengembangan sistem informasi yang mendukung aktivitas usaha. Digitalisasi menjadi salah satu prioritas karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, memperluas akses pasar, dan memperkuat daya saing UMKM pada tingkat nasional maupun global.

Meskipun demikian, efektivitas kebijakan pemerintah masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah belum meratanya akses terhadap program pemberdayaan, terutama bagi UMKM yang berada di wilayah pedesaan dan daerah terpencil. Selain itu, masih terdapat pelaku usaha yang belum memanfaatkan berbagai fasilitas yang telah disediakan akibat keterbatasan informasi, rendahnya literasi digital, maupun minimnya kemampuan administrasi usaha. Oleh karena itu, strategi pemberdayaan perlu dilakukan secara lebih inklusif dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, serta sektor swasta.

Pendekatan *collaborative governance* salah satu strategi yang semakin relevan dalam pengembangan UMKM. Melalui kolaborasi lintas sektor, setiap pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan kompetensinya. Pemerintah menyediakan regulasi dan kebijakan, perguruan tinggi menghasilkan inovasi dan pendampingan,

lembaga keuangan memperluas akses pembiayaan, sedangkan sektor swasta membuka peluang kemitraan dan akses pasar. Kolaborasi tersebut menciptakan ekosistem usaha yang lebih kondusif sehingga mempercepat peningkatan daya saing UMKM.

Secara keseluruhan, sintesis kajian empiris menunjukkan bahwa dukungan pemerintah merupakan faktor penguat yang memperbesar efektivitas praktik manajemen keuangan dan pemanfaatan teknologi. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan UMKM di Sulawesi Barat memerlukan sinergi antara kemampuan internal pelaku usaha dan dukungan eksternal melalui kebijakan publik yang berkelanjutan.

4. Sinergi Manajemen Keuangan, Pemahaman Teknologi, dan Peran Pemerintah dalam Membentuk Kinerja UMKM

Keberhasilan UMKM dalam menghadapi persaingan tidak dapat dijelaskan hanya oleh satu faktor. Dalam praktiknya, peningkatan kinerja usaha merupakan hasil interaksi antara kemampuan internal pelaku usaha dengan dukungan lingkungan eksternal. Manajemen

keuangan, pemahaman teknologi, dan peran pemerintah merupakan tiga komponen yang saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Manajemen keuangan menyediakan dasar bagi pelaku usaha untuk mengelola sumber daya secara efisien. Melalui pencatatan yang sistematis, pengendalian biaya, pengelolaan arus kas, dan perencanaan investasi, pelaku usaha mampu menghasilkan keputusan yang lebih rasional. Namun demikian, efektivitas manajemen keuangan akan semakin meningkat apabila didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi pembukuan, sistem pembayaran elektronik, serta layanan keuangan digital mempercepat proses pengelolaan informasi sehingga meningkatkan akurasi dan efisiensi administrasi usaha.

Di sisi lain, keberhasilan penerapan teknologi tidak dapat dilepaskan dari dukungan pemerintah. Penyediaan infrastruktur digital, pelatihan literasi digital, akses pembiayaan, dan kebijakan yang mendukung inovasi menjadi

faktor yang mempercepat adopsi teknologi oleh UMKM. Tanpa dukungan tersebut, banyak pelaku usaha akan mengalami kesulitan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal karena keterbatasan sumber daya dan pengetahuan.

Kajian empiris dalam buku ini memperlihatkan bahwa UMKM yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut menunjukkan tingkat adaptabilitas yang lebih tinggi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Mereka tidak hanya lebih efisien dalam mengelola keuangan, tetapi juga lebih cepat merespons perubahan permintaan pasar, memanfaatkan peluang digital, dan memperluas jaringan usaha. Sebaliknya, UMKM yang hanya mengandalkan salah satu faktor cenderung mengalami keterbatasan dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif *Resource Based View* (RBV), manajemen keuangan dan kemampuan teknologi merupakan sumber daya strategis yang dimiliki oleh organisasi. Sementara itu, dalam perspektif *Technology Organization Environment* (TOE) Framework, keberhasilan

adopsi teknologi dipengaruhi oleh kesiapan organisasi dan dukungan lingkungan. Integrasi kedua teori tersebut memberikan penjelasan bahwa peningkatan kinerja UMKM merupakan hasil dari kombinasi antara pengelolaan sumber daya internal yang efektif dan dukungan lingkungan eksternal yang kondusif.

Berdasarkan sintesis tersebut, dapat dipahami bahwa strategi pengembangan UMKM di Sulawesi Barat tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan akses modal. Upaya peningkatan daya saing harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan manajemen keuangan, peningkatan literasi digital, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, perluasan akses pasar, serta kebijakan pemerintah yang konsisten dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Pendekatan yang terintegrasi akan menghasilkan UMKM yang lebih produktif, inovatif, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Tabel 4 Implikasi Praktis bagi Pelaku UMKM dan Pemerintah

Pemangku Kepentingan	Temuan Utama	Implikasi Praktis
Pelaku UMKM	Manajemen keuangan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja usaha.	Menyusun pembukuan sederhana, memisahkan keuangan usaha dan pribadi, serta melakukan evaluasi arus kas secara berkala.
Pelaku UMKM	Pemanfaatan teknologi meningkatkan efisiensi usaha.	Menggunakan aplikasi pembukuan digital, QRIS, media sosial, dan marketplace sebagai bagian dari strategi bisnis.
Pemerintah Daerah	Program pemberdayaan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas UMKM.	Memperluas cakupan pelatihan, pendampingan, dan digitalisasi UMKM hingga ke wilayah pedesaan.
Lembaga Keuangan	Masih banyak UMKM yang belum memiliki administrasi keuangan yang baik.	Menyediakan program literasi keuangan dan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM.

Perguruan Tinggi	Pendampingan akademik meningkatkan kemampuan manajerial pelaku usaha.	Mengembangkan program pengabdian masyarakat, inkubasi bisnis, dan konsultasi manajemen bagi UMKM.
------------------	---	---

Sumber: Sintesis hasil kajian empiris penulis (2026).

BAB

7

Studi Kasus Pengembangan Kinerja UMKM

A. Potret UMKM Sulawesi Barat sebagai Penggerak Ekonomi Daerah

Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah yang menempatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya Industri Mikro dan Kecil (IMK), sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan IMK tidak hanya berfungsi sebagai penggerak aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, dan pengurangan kemiskinan. Ketahanan sektor ini juga telah terbukti pada berbagai periode perlambatan ekonomi, ketika banyak usaha berskala besar mengalami penurunan aktivitas, sementara industri mikro dan kecil tetap mampu bertahan melalui pemanfaatan sumber daya lokal dan fleksibilitas dalam beradaptasi terhadap perubahan pasar.

Berdasarkan Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, terdapat 24.738 unit usaha Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat. Struktur industri tersebut menunjukkan bahwa sektor pengolahan pangan masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Industri makanan (KBLI 10) mendominasi dengan 11.357 unit usaha, diikuti industri tekstil sebanyak 7.440 unit usaha, serta industri kayu, barang dari kayu, gabus, rotan, dan bambu sebanyak 1.857 unit usaha. Sebaliknya, industri alat angkutan, kendaraan bermotor, dan mesin masih relatif sedikit berkembang karena membutuhkan investasi modal dan teknologi yang lebih besar. Dominasi industri makanan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Sulawesi Barat masih bertumpu pada pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan diolah menjadi berbagai produk pangan yang memiliki nilai tambah ekonomi. Karakteristik tersebut mencerminkan bahwa pengembangan UMKM di Sulawesi Barat memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor

primer sehingga peningkatan daya saing UMKM juga akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dari sisi ketenagakerjaan, IMK di Sulawesi Barat menyerap 42.103 tenaga kerja, dengan 85,54% di antaranya merupakan pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar usaha masih berskala rumah tangga (*home industry*), di mana pemilik usaha menjalankan aktivitas produksi bersama anggota keluarganya. Selain itu, terdapat 13.833 usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang, yaitu pemilik usaha sendiri. Karakteristik tersebut memiliki implikasi penting terhadap praktik manajemen usaha. Karena sebagian besar usaha masih dikelola secara keluarga, sistem administrasi dan pencatatan keuangan sering kali belum dipisahkan dari keuangan rumah tangga. Pendapatan usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan kebutuhan keluarga juga sering dibiayai menggunakan modal usaha. Akibatnya, pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya, sehingga pengambilan keputusan bisnis lebih banyak

didasarkan pada pengalaman daripada informasi keuangan yang terukur.

Data BPS juga menunjukkan bahwa 55,92% usaha dikelola secara tunggal oleh pemiliknya, sedangkan 49,17% pengusaha berada pada kelompok usia 45–64 tahun. Di sisi lain, tingkat pendidikan pengusaha masih relatif rendah, di mana 66,59% pengusaha berpendidikan SD atau tidak tamat SD, sedangkan lulusan Diploma ke atas hanya sekitar 6,16%.

Rendahnya tingkat pendidikan formal tidak dapat diartikan sebagai rendahnya kemampuan berwirausaha. Banyak pelaku UMKM memiliki pengalaman usaha yang panjang dan pengetahuan praktis yang tinggi. Namun demikian, keterbatasan pendidikan formal sering kali memengaruhi kemampuan dalam memahami laporan keuangan, menyusun perencanaan usaha, memanfaatkan teknologi digital, maupun mengakses informasi pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan literasi digital menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pengembangan UMKM di Sulawesi Barat.

Dari sisi permodalan, mayoritas usaha masih mengandalkan modal sendiri. Sebanyak 92,19% UMK menggunakan modal yang sepenuhnya berasal dari pemilik usaha, sedangkan hanya 7,81% yang memanfaatkan modal dari pihak lain. Di antara usaha yang memperoleh pembiayaan eksternal, sumber pembiayaan terbesar berasal dari Bank Subsidi (43,15%), diikuti koperasi (29,85%) dan lembaga keuangan bukan bank (15,36%).

Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan UMK di Sulawesi Barat masih perlu ditingkatkan. Ketergantungan yang tinggi terhadap modal sendiri memang mencerminkan kehati-hatian pelaku usaha dalam mengelola risiko utang. Namun, di sisi lain kondisi tersebut membatasi kemampuan usaha untuk melakukan ekspansi, meningkatkan kapasitas produksi, maupun berinvestasi pada teknologi baru. Oleh sebab itu, peningkatan akses pembiayaan harus diiringi dengan penguatan kapasitas manajemen keuangan agar modal yang diperoleh dapat dikelola secara produktif.

Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM juga memperlihatkan pentingnya penguatan aspek manajerial. Sebanyak 77,35% usaha mengalami kendala dalam menjalankan usahanya, dengan tiga kendala terbesar yaitu permodalan (55,12%), ketersediaan bahan baku (33,14%), dan pemasaran (9,24%).

Jika dianalisis lebih mendalam, ketiga kendala tersebut sebenarnya saling berkaitan. Keterbatasan modal menghambat kemampuan pelaku usaha memperoleh bahan baku dalam jumlah besar, sedangkan keterbatasan pemasaran menyebabkan perputaran modal menjadi lambat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian masalah UMKM tidak cukup dilakukan melalui bantuan modal semata, tetapi harus disertai peningkatan kompetensi manajemen keuangan, pemanfaatan teknologi digital, inovasi produk, dan perluasan akses pasar.

Selain itu, data menunjukkan bahwa hanya 3,84% UMKM yang menjalin kemitraan usaha dengan perusahaan lain. Rendahnya angka kemitraan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar UMKM masih menjalankan usaha secara mandiri sehingga memiliki keterbatasan dalam memperoleh transfer teknologi, akses pasar, peningkatan kualitas produk, maupun pengembangan jaringan bisnis. Ke depan, penguatan kemitraan antara UMKM, perusahaan besar, perguruan tinggi, pemerintah, dan lembaga keuangan perlu menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan daya saing UMKM Sulawesi Barat. Secara keseluruhan, potret UMKM Sulawesi Barat memperlihatkan bahwa sektor ini memiliki potensi yang sangat besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Namun demikian, penguatan kapasitas manajemen keuangan, peningkatan literasi digital, perluasan akses pembiayaan, serta pengembangan kemitraan usaha masih menjadi agenda penting dalam menciptakan UMKM yang lebih produktif, inovatif, dan berdaya saing. Temuan ini sekaligus menjadi dasar bagi pembahasan studi kasus pada subbab berikutnya

yang menguraikan praktik pengelolaan UMKM pada berbagai sektor usaha di Sulawesi Barat.

B. Studi Kasus Digitalisasi UMKM di Sulawesi Barat

1. Transformasi Digital sebagai Strategi Pengembangan Usaha

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara pelaku UMKM menjalankan aktivitas bisnis. Jika sebelumnya transaksi dilakukan secara konvensional, saat ini berbagai aktivitas usaha telah memanfaatkan teknologi digital, mulai dari promosi produk, komunikasi dengan pelanggan, transaksi pembayaran, hingga penyusunan laporan keuangan. Transformasi tersebut memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas jangkauan pasar.

Di Sulawesi Barat, proses digitalisasi UMKM menunjukkan perkembangan yang cukup positif, meskipun tingkat adopsinya masih bervariasi. Pelaku usaha yang berada di wilayah perkotaan cenderung lebih cepat memanfaatkan teknologi dibandingkan pelaku usaha di daerah pedesaan. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan jaringan internet, tingkat pendidikan, usia pelaku usaha, serta intensitas pendampingan yang diterima.

Berdasarkan data Profil Industri Mikro dan Kecil Provinsi Sulawesi Barat, mayoritas pelaku usaha berada pada kelompok usia produktif 45–64 tahun dengan tingkat pendidikan yang masih didominasi lulusan sekolah dasar. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan adopsi teknologi digital. Rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian pelaku usaha masih menganggap penggunaan aplikasi digital sebagai sesuatu yang rumit dan memerlukan biaya yang besar. Padahal, berbagai aplikasi pembukuan dan pemasaran digital saat ini telah tersedia secara gratis dan mudah digunakan.

Perubahan pola perilaku konsumen setelah meningkatnya penggunaan internet juga mendorong UMKM untuk beradaptasi. Konsumen tidak lagi hanya mencari produk secara langsung, tetapi juga melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform perdagangan elektronik. Oleh karena itu, digitalisasi menjadi kebutuhan strategis agar UMKM tetap mampu bersaing dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis.

2. Digitalisasi Pengelolaan Keuangan

Transformasi digital tidak hanya mengubah sistem pemasaran, tetapi juga membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik manajemen keuangan. Saat ini berbagai aplikasi pembukuan digital memungkinkan pelaku usaha mencatat transaksi secara otomatis, menyusun laporan laba rugi, memantau arus kas, hingga menghitung persediaan barang secara real time.

Bagi UMKM di Sulawesi Barat, penggunaan aplikasi pembukuan memberikan beberapa manfaat. Pertama, proses pencatatan menjadi lebih sederhana karena seluruh transaksi tersimpan secara otomatis. Kedua, pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangan setiap saat tanpa harus menghitung ulang secara manual. Ketiga, laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan.

Kajian empiris dalam buku ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang mulai memanfaatkan aplikasi pembukuan memiliki disiplin yang lebih baik dalam melakukan pencatatan transaksi. Mereka lebih mudah mengetahui jumlah penjualan, biaya operasional, laba usaha, maupun posisi kas harian. Informasi tersebut membantu pemilik usaha dalam mengambil keputusan yang lebih rasional dibandingkan keputusan yang hanya didasarkan pada perkiraan.

Digitalisasi juga meningkatkan transparansi pengelolaan usaha. Seluruh transaksi terdokumentasi secara sistematis sehingga memudahkan proses evaluasi usaha maupun penyusunan laporan keuangan. Transparansi tersebut menjadi salah satu syarat penting dalam meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, investor, maupun mitra bisnis.

3. Pemanfaatan Media Digital untuk Pemasaran

Selain aspek keuangan, teknologi digital memberikan dampak yang besar terhadap strategi pemasaran UMKM. Sebelumnya, sebagian besar pelaku usaha hanya menjual produk kepada konsumen yang berada di sekitar lokasi usaha. Saat ini, penggunaan media sosial dan marketplace memungkinkan produk UMKM dipasarkan hingga ke berbagai daerah di Indonesia.

Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp Business telah menjadi sarana promosi yang efektif karena mampu menjangkau konsumen dengan biaya yang relatif rendah. Melalui konten visual yang menarik, pelaku UMKM dapat memperkenalkan produk, membangun identitas merek, serta menjalin komunikasi secara langsung dengan pelanggan.

Di Sulawesi Barat, pelaku UMKM yang aktif memanfaatkan media digital menunjukkan peningkatan jumlah pelanggan dibandingkan usaha yang hanya mengandalkan pemasaran konvensional. Digitalisasi juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk menerima pesanan secara daring, melakukan promosi berkala, serta membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen.

Namun demikian, keberhasilan pemasaran digital tidak hanya ditentukan oleh penggunaan media sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas produk, pelayanan, kemasan, harga, serta kemampuan menjaga kepercayaan pelanggan. Oleh sebab itu, transformasi digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas manajemen usaha secara menyeluruh.

C. Studi Kasus Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM

Pemerintah memiliki posisi strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui penyediaan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, fasilitasi legalitas usaha, serta pengembangan jaringan pemasaran.

Di Provinsi Sulawesi Barat, program pemberdayaan UMKM dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah daerah, dinas terkait, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Bentuk dukungan tersebut meliputi pelatihan penyusunan laporan keuangan, penggunaan aplikasi digital, peningkatan kualitas produk, sertifikasi halal, Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga fasilitasi keikutsertaan dalam pameran produk lokal.

Data BPS menunjukkan bahwa masih terdapat 92,19% UMKM yang menggunakan modal sendiri, sedangkan hanya sebagian kecil yang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perluasan akses pembiayaan masih menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan UMKM di Sulawesi Barat.

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pendampingan melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT), serta berbagai program inkubasi bisnis telah memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya. Namun demikian, efektivitas program tersebut sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam menyusun administrasi keuangan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan.

Hasil kajian empiris dalam buku ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memperoleh pendampingan cenderung memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang belum pernah mengikuti program pelatihan. Mereka lebih memahami pentingnya pencatatan keuangan, penyusunan anggaran, pengelolaan arus kas, serta penggunaan teknologi digital dalam mendukung aktivitas usaha.

Selain meningkatkan kompetensi individu, program pemerintah juga berperan dalam memperkuat jejaring usaha. Melalui pameran, kemitraan, dan promosi produk lokal, pelaku UMKM memperoleh kesempatan untuk memperluas pasar dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Pendekatan kolaboratif tersebut menjadi salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM di tingkat regional maupun nasional.

D. Sintesis Pembelajaran Berdasarkan Kajian Empiris UMKM di Sulawesi Barat

Pembahasan pada bab ini memperlihatkan bahwa pengembangan UMKM di Sulawesi Barat tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola aktivitas bisnis sehari-hari, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan keuangan, tingkat pemahaman terhadap teknologi digital, serta dukungan pemerintah melalui berbagai program pemberdayaan. Ketiga faktor tersebut saling melengkapi dan membentuk fondasi penting dalam meningkatkan kinerja serta keberlanjutan usaha.

Kajian empiris yang menjadi dasar penyusunan buku ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan merupakan faktor yang paling mendasar dalam menentukan keberhasilan UMKM. Pelaku usaha yang menerapkan pencatatan transaksi secara rutin, menyusun anggaran usaha, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta melakukan evaluasi terhadap arus kas memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola aktivitas bisnis dibandingkan pelaku usaha yang masih menggunakan sistem administrasi sederhana. Praktik tersebut memberikan kemudahan dalam mengetahui kondisi keuangan usaha secara objektif sehingga keputusan bisnis dapat dilakukan berdasarkan informasi yang akurat. Temuan tersebut juga memperlihatkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki sistem administrasi keuangan yang lebih baik relatif lebih mudah memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Laporan keuangan yang tersusun secara sistematis meningkatkan kepercayaan lembaga pembiayaan karena memberikan gambaran mengenai kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan dan

memenuhi kewajiban finansial. Dengan demikian, manajemen keuangan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga menjadi instrumen yang memperluas peluang pengembangan usaha melalui akses terhadap sumber pembiayaan.

Selain aspek keuangan, pemahaman teknologi menjadi faktor penting yang memperkuat kemampuan UMKM dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaku usaha yang telah memanfaatkan aplikasi pembukuan digital, sistem pembayaran elektronik, media sosial, dan marketplace memiliki efisiensi operasional yang lebih baik dibandingkan pelaku usaha yang masih mengandalkan metode konvensional. Digitalisasi memungkinkan transaksi tercatat secara otomatis, mempercepat proses administrasi, serta menghasilkan informasi keuangan yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, pemanfaatan teknologi juga memberikan dampak terhadap perluasan pasar. Pelaku usaha yang aktif menggunakan media digital mampu menjangkau konsumen di luar wilayah Sulawesi Barat sehingga tidak lagi bergantung pada pasar lokal. Perubahan tersebut meningkatkan peluang pertumbuhan usaha sekaligus memperkuat daya saing UMKM pada era ekonomi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi telah menjadi sumber daya strategis yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha. Kajian empiris selanjutnya Berbagai program pelatihan, pendampingan, fasilitasi legalitas usaha, digitalisasi UMKM, serta penyediaan akses pembiayaan memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kemampuan manajerial. Pelaku UMKM yang mengikuti program pendampingan menunjukkan pemahaman yang lebih baik mengenai penyusunan laporan keuangan, penggunaan teknologi digital, serta strategi pengembangan usaha.

Meskipun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa efektivitas program pemerintah sangat dipengaruhi oleh kesiapan pelaku usaha dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Program pelatihan akan memberikan dampak yang optimal apabila diikuti dengan pendampingan berkelanjutan, monitoring, dan evaluasi terhadap implementasi di lapangan. Oleh karena itu, pemberdayaan UMKM perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif dengan melibatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, komunitas bisnis, dan organisasi masyarakat. Sintesis dari seluruh hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja UMKM di Sulawesi Barat merupakan hasil interaksi antara kemampuan internal dan dukungan eksternal. Manajemen keuangan membentuk fondasi pengelolaan usaha, pemahaman teknologi meningkatkan efisiensi dan inovasi, sedangkan peran pemerintah memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui berbagai bentuk fasilitasi. Ketiga aspek tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dalam membentuk sistem

pengelolaan usaha yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam perspektif Resource Based View (RBV), manajemen keuangan dan kemampuan memanfaatkan teknologi merupakan sumber daya strategis yang dimiliki oleh organisasi. Sumber daya tersebut akan menghasilkan keunggulan kompetitif apabila dikelola secara efektif dan didukung oleh lingkungan eksternal yang kondusif. Sementara itu, dari perspektif *Technology Organization Environment* (TOE), keberhasilan transformasi digital tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi dan dukungan kebijakan pemerintah. Integrasi kedua perspektif tersebut memberikan pemahaman bahwa peningkatan kinerja UMKM memerlukan pendekatan yang bersifat komprehensif, tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, inovasi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil kajian empiris yang disajikan dalam buku ini, dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM di Sulawesi Barat perlu diarahkan pada tiga strategi utama. Pertama, meningkatkan kualitas manajemen keuangan melalui penguatan literasi keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan arus kas. Kedua, mempercepat transformasi digital melalui peningkatan literasi teknologi, pemanfaatan aplikasi digital, dan perluasan pemasaran berbasis platform digital. Ketiga, memperkuat sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem usaha yang mampu mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan. Dengan demikian, studi kasus yang disajikan dalam bab ini menegaskan bahwa keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal atau lamanya pengalaman usaha, tetapi oleh kemampuan pelaku usaha dalam mengelola sumber daya secara profesional, beradaptasi terhadap perkembangan teknologi, serta memanfaatkan berbagai program pemberdayaan yang disediakan oleh pemerintah.

BAB

8

Strategi Penguatan UMKM

A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadikan sektor ini sebagai prioritas dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Berdasarkan berbagai kajian, UMKM memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis sehingga mampu bertahan pada berbagai kondisi ekonomi, termasuk ketika terjadi krisis ekonomi maupun gangguan terhadap rantai pasok global. Karakteristik tersebut menjadikan UMKM sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Di Provinsi Sulawesi Barat, perkembangan UMKM menunjukkan potensi yang cukup besar karena didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang melimpah, terutama pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, dan industri rumah tangga. Produk-produk lokal seperti olahan hasil perikanan, kopi, kakao, kelapa, pangan lokal, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan menjadi produk yang memiliki daya saing tinggi. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan manajerial dan kapasitas bisnis yang memadai sehingga sebagian besar UMKM masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam meningkatkan skala usahanya.

Pembahasan pada bab-bab sebelumnya menunjukkan bahwa tantangan utama UMKM di Sulawesi Barat meliputi rendahnya kualitas manajemen keuangan, keterbatasan pemanfaatan teknologi digital, rendahnya inovasi produk, keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, serta lemahnya jejaring kemitraan. Selain itu,

sebagian besar pelaku usaha masih menjalankan usaha secara tradisional dengan sistem administrasi yang sederhana sehingga proses pengambilan keputusan sering kali belum didasarkan pada informasi keuangan yang akurat. Kondisi tersebut menyebabkan produktivitas usaha berkembang secara lambat dan menyulitkan UMKM untuk bersaing pada pasar yang semakin kompetitif.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat juga memperlihatkan bahwa mayoritas UMKM masih mengandalkan modal sendiri sebagai sumber pembiayaan utama. Di sisi lain, tingkat adopsi teknologi digital masih belum merata, terutama pada UMKM yang berada di wilayah pedesaan. Rendahnya tingkat pendidikan formal sebagian pelaku usaha juga menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha. Oleh karena itu, strategi penguatan UMKM tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dengan memperhatikan aspek internal maupun eksternal yang memengaruhi perkembangan usaha.

Dalam perspektif *Resource Based View* (RBV), keunggulan kompetitif suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh besarnya aset fisik yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan mengelola sumber daya internal seperti pengetahuan, keterampilan, sistem manajemen, dan kemampuan berinovasi. Sementara itu, pendekatan *Technology Organization Environment* (TOE) menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan teknologi dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, karakteristik teknologi, serta dukungan lingkungan eksternal. Kedua perspektif tersebut memberikan dasar konseptual bahwa penguatan UMKM harus dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem manajemen, percepatan transformasi digital, serta dukungan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan sintesis teori, kajian empiris, dan studi kasus yang telah dibahas pada bab sebelumnya, strategi penguatan UMKM di Sulawesi Barat perlu diarahkan pada pembangunan ekosistem usaha yang kolaboratif. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, sektor

swasta, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha harus memiliki peran yang saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif. Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat daya saing, memperluas akses pasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

B. Strategi Penguatan Manajemen Keuangan UMKM

Manajemen keuangan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan suatu usaha karena seluruh aktivitas bisnis pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana sumber daya keuangan direncanakan, digunakan, dikendalikan, dan dievaluasi. Bagi UMKM, manajemen keuangan bukan sekadar kegiatan administratif berupa pencatatan transaksi, tetapi merupakan proses strategis yang menentukan kemampuan usaha dalam mempertahankan keberlangsungan operasional, meningkatkan efisiensi penggunaan modal, serta menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan manajemen keuangan menjadi langkah awal yang

harus dilakukan sebelum UMKM melakukan ekspansi usaha maupun transformasi digital.

Hasil pembahasan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Sulawesi Barat masih menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Praktik pencatatan transaksi masih dilakukan secara sederhana, bahkan tidak sedikit pelaku usaha yang belum melakukan pembukuan secara rutin. Selain itu, masih ditemukan kecenderungan mencampurkan keuangan usaha dengan keuangan rumah tangga sehingga pelaku usaha mengalami kesulitan dalam mengetahui kondisi keuangan yang sebenarnya. Kondisi tersebut menyebabkan keputusan bisnis lebih banyak didasarkan pada intuisi daripada analisis keuangan yang sistematis.

Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan literasi keuangan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Literasi keuangan tidak hanya mencakup kemampuan membaca laporan keuangan, tetapi juga pemahaman mengenai pengelolaan kas, penyusunan anggaran,

pengendalian biaya, analisis keuntungan, investasi, hingga pengelolaan risiko usaha. Program peningkatan literasi keuangan hendaknya dirancang sesuai dengan karakteristik UMKM di Sulawesi Barat sehingga materi yang diberikan mudah dipahami dan dapat langsung diterapkan dalam aktivitas usaha sehari-hari.

Pelatihan yang bersifat teoritis perlu dipadukan dengan praktik langsung melalui simulasi penyusunan laporan keuangan sederhana, penggunaan aplikasi pembukuan digital, serta pendampingan penyusunan anggaran usaha. Pendekatan pembelajaran berbasis praktik akan membantu pelaku usaha memahami manfaat nyata dari pengelolaan keuangan yang baik sehingga perubahan perilaku dalam menjalankan usaha dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Strategi kedua adalah mendorong pemisahan keuangan usaha dan keuangan pribadi. Praktik ini merupakan prinsip dasar dalam manajemen keuangan modern karena memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi yang objektif mengenai kondisi usahanya. Pemisahan rekening

bank, pencatatan transaksi harian, serta penyusunan laporan keuangan bulanan menjadi langkah sederhana namun memiliki dampak yang besar terhadap kualitas pengambilan keputusan.

Pemisahan keuangan juga memberikan manfaat dalam meningkatkan kredibilitas usaha di hadapan lembaga keuangan. UMKM yang memiliki administrasi keuangan yang baik akan lebih mudah memenuhi persyaratan pengajuan kredit maupun memperoleh kepercayaan dari investor. Dengan demikian, pemisahan keuangan tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan internal, tetapi juga membuka peluang pengembangan usaha melalui akses terhadap sumber pembiayaan formal.

Strategi ketiga adalah meningkatkan kemampuan perencanaan keuangan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perencanaan keuangan memungkinkan pelaku usaha memperkirakan kebutuhan modal kerja, menyusun target penjualan, merencanakan investasi, serta mengantisipasi berbagai risiko usaha. Dalam lingkungan bisnis yang semakin dinamis, kemampuan melakukan proyeksi

keuangan menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap pelaku UMKM.

Perencanaan keuangan juga perlu didukung oleh sistem pengendalian biaya yang efektif. Pengendalian biaya tidak berarti mengurangi kualitas produk, tetapi mengoptimalkan penggunaan sumber daya agar menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Evaluasi terhadap biaya produksi, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya operasional lainnya perlu dilakukan secara berkala agar pelaku usaha mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mempertahankan kualitas produk.

Strategi keempat adalah mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan. Saat ini tersedia berbagai aplikasi pembukuan yang dirancang khusus untuk UMKM dengan fitur pencatatan transaksi, laporan laba rugi, arus kas, hingga pengelolaan persediaan. Penggunaan aplikasi tersebut akan mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat penyusunan laporan keuangan, serta menyediakan informasi yang lebih akurat bagi pengambilan keputusan.

Integrasi antara literasi keuangan dan literasi digital menjadi salah satu faktor penting dalam membangun sistem manajemen keuangan yang modern.

Selanjutnya, penguatan manajemen keuangan memerlukan dukungan kelembagaan melalui pendampingan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan organisasi pendamping UMKM perlu bersinergi dalam menyediakan layanan konsultasi, pelatihan, serta monitoring terhadap implementasi pengelolaan keuangan di tingkat pelaku usaha. Pendekatan ini akan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan karena pelaku usaha memperoleh solusi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan usahanya.

Secara keseluruhan, strategi penguatan manajemen keuangan harus dipahami sebagai investasi jangka panjang dalam membangun kapasitas UMKM. Pengelolaan keuangan yang baik akan menghasilkan informasi yang berkualitas, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperkuat akses terhadap pembiayaan, serta

mendukung keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, manajemen keuangan tidak lagi dipandang sebagai aktivitas administratif semata, melainkan sebagai kapabilitas strategis yang menentukan daya saing UMKM di tengah persaingan ekonomi yang semakin kompleks.

Tabel 5 Strategi Penguatan Manajemen Keuangan UMKM

Strategi	Program Utama	Hasil yang Diharapkan
Peningkatan literasi keuangan	Pelatihan, pendampingan, modul pembukuan	Kemampuan pengelolaan keuangan meningkat
Pemisahan keuangan usaha	Rekening usaha, pencatatan transaksi	Keuangan usaha lebih akuntabel
Perencanaan keuangan	Penyusunan anggaran dan proyeksi kas	Pengambilan keputusan lebih terarah
Digitalisasi keuangan	Aplikasi pembukuan, QRIS, pembayaran digital	Administrasi lebih efisien dan akurat
Pendampingan berkelanjutan	Konsultasi dan monitoring	Implementasi praktik keuangan yang berkelanjutan

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan sintesis teori dan kajian empiris (2026).

Daftar Pustaka

- Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. (2026). *Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2025*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2022). *Fundamentals of financial management* (16th ed.). Cengage Learning.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). Sage Publications.
- de Mattos, C. A., et al. (2024). Digital transformation research: A systematic literature review. *Management Review Quarterly*. <https://doi.org/10.1007/s11301-023-00327-7>
- Febriyani, W., Supratman, N. A., & Witjaksono, R. W. (2024). Exploring the contribution of fintech to digital transformation in Indonesian MSMEs: A literature review. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*.
- Gitman, L. J., Juchau, R., & Flanagan, J. (2022). *Principles of managerial finance* (8th Asia-Pacific ed.). Pearson Education.
- Gunawan, A. W., & Tasrim. (2025). Bridging knowledge and technology: A systematic literature review on financial literacy, digitalization, and MSME sustainability. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*. <https://doi.org/10.37385/msej.v6i5.8327>
- Gunibala, Z. (2025). Scoping review: Efektivitas penggunaan fintech terhadap kinerja UMKM Indonesia. *Jurnal Bisnis Kompetitif*. <https://doi.org/10.35446/bisniskompetif.v4i1.2069>
- Hair, J. F., Howard, M. C., & Nitzl, C. (2022). Assessing measurement model quality in PLS-SEM using confirmatory composite analysis. *Journal of Business Research*, 146, 609–620.

- Harsono, S., & Rinanda, T. (2025). Enhancement of MSME digitalization with collaborative governance: Public values, decision-making, and the administrative context. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 11(2), 355–369. <https://doi.org/10.17358/IJBE.11.2.355>
- Hendrawan, S. A., Chatra, A., Iman, N., Hidayatullah, S., & Suprayitno, D. (2024). Digital transformation in MSMEs: Challenges and opportunities in technology management. *Jurnal Informasi dan Teknologi*, 6(2), 141–149. <https://doi.org/10.60083/jidt.v6i2.551>
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115–135. <https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8>
- Hidayat, R. (2025a). Buy Now Pay Later dan Generasi Z: Dampaknya terhadap Manajemen Keuangan dan Perilaku Berutang di Sulawesi Barat. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 9. <https://doi.org/10.53697/emak.v6i3.2921>
- Hidayat, R. (2025b). The Strategic Role of E-Payment in Linking Sharia Financial Literacy, Financial Behavior, and MSME Welfare in Sulawesi Barat. In *Journal of Advances in Accounting, Economics, and Management* (Vol. 3, Issue 1). <https://economics.pubmedia.id/index.php/aaem>
- Hidayat, R. (2025). Modeling the Effect of Financial Literacy and Inclusion on MSME Sustainability Through Financial Management. *ARBITRASE: JOURNAL OF ECONOMICS AND ACCOUNTING*, 6(2), 458–466. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v6i2.2522>
- Hidayat, R., & Fitriani, A. (2026). Exploring the nexus of financial management, understanding of technology, and the role of governance in shaping

- MSME performance. *Jurnal Cendekia Keuangan*, 5(1), 53–62. <https://doi.org/10.32503/jck.v5i1.8753>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM). Ikatan Akuntan Indonesia.
- International Labour Organization. (2023). Small and medium enterprises and decent work. ILO.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263–291. <https://doi.org/10.2307/1914185>
- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. (2024). Perkembangan Data UMKM Tahun 2024.
- Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia. (2025). UMKM dalam Angka: Data Makro UMKM Indonesia Tahun 2020–2024. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia.
- Kusumawardani, N., & Syafis, K. S. (2025). Digital transformation and total quality management as moderators: Implications for the financial performance of micro, small, and medium enterprises. *AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 4(1). <https://doi.org/10.20961/akumulasi.v4i1.2336>
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Malodia, S., et al. (2023). Achieving resilience through digital transformation: A systematic review and future research agenda. *Journal of Business Research*.
- Mazelfi, I., & Kurniawan, I. T. (2025). Trend penelitian sistem informasi akuntansi pada UMKM: Sebuah systematic literature review. *Journal of Applied Managerial Accounting*. <https://doi.org/10.30871/jama.v10i1.12884>

- Mubarak, H., dkk. (2025). Strategi manajemen keuangan dan akuntansi manajemen UMKM di era digital: Studi literatur sistematis. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Indonesia*. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.966>
- Muslimin, U. R., Tandililing, E. M., Ratnasari, P., Patty, M. A., & Nurjannah, R. A. (2025). Financial literacy, capital structure, and financial planning as determinants of MSME sustainability: Mediating role of profitability. *INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi*, 7(1). <https://doi.org/10.55583/invest.v7i1.2087>
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, 13(2), 187–221. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(84\)90023-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0)
- Nugraha, G. I. K., Handayati, P., & Siswanto, E. (2025). The effect of financial literacy and access to financing on the financial performance of MSMEs: The role of financial management mediation and financial technology moderation (A systematic literature review). *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 4(6). <https://doi.org/10.55927/fjmr.v4i6.261>
- Nurachmad, E., Mulyana, M., Sukamto, A., & Mulia, I. (2025). Adoption of digital-based management information systems and its impact on MSME performance in Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(1). <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.4004>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2021). *The digital transformation of SMEs*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/bdb9256a-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *SME and entrepreneurship outlook 2023*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/34907e9c-en>
- Penrose, E. T. (1959). *The theory of the growth of the firm*. Basil Blackwell.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Purnomo, S., Purwandari, S., & Kumar, S. (2024). Digital transformation and profitability of MSME manufacturing sector in Indonesia. *International Business and Accounting Research Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.35474/ibarj.v8i1.274>
- Rita, M. R., & Nastiti, P. K. Y. (2024). The influence of financial bootstrapping and digital transformation on financial performance: Evidence from MSMEs in the culinary sector in Indonesia. *Cogent Business & Management*, 11(1), 2363415. <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2363415>
- Ross, S. A., Westerfield, R. W., Jordan, B. D., Lim, J., & Tan, R. (2022). *Fundamentals of corporate finance* (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rosyidiana, R. N., & Narsa, I. M. (2024). Micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) during the post-pandemic economic recovery period: Digitalization, literation, innovation, and its impact on financial performance. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2342488>
- Sarstedt, M., Ringle, C. M., & Hair, J. F. (2022). Partial least squares structural equation modeling. Dalam *Handbook of Market Research*. Springer.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2021). *Research methods for business: A skill-building approach* (9th ed.). Wiley.
- Shmueli, G., Sarstedt, M., Hair, J. F., Cheah, J.-H., Ting, H., Vaithilingam, S., & Ringle, C. M. (2019). Predictive model assessment in PLS-SEM using

- PLSpredict. *European Journal of Marketing*, 53(11), 2322–2347. <https://doi.org/10.1108/EJM-02-2019-0189>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D (Edisi terbaru)*. Alfabeta.
- Tornatzky, L. G., & Fleischer, M. (1990). *The processes of technological innovation*. Lexington Books.
- Tubastuvi, N., Ainun, R. N., Purwidiyanti, W., & Zamakhsyari, L. (2024). Enhancing MSME: Exploring the relationship between financial literacy, financial inclusion, and capital access to improve performance. *Airlangga Journal of Innovation Management*, 5(1). <https://doi.org/10.20473/ajim.v5i1.53990>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- United Nations. (2023). *The Sustainable Development Goals Report 2023*.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2024). *Digital Economy Report 2024*.
- Verhoef, P. C., et al. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research*, 122, 889–901. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.09.022>
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171–180. <https://doi.org/10.1002/smj.4250050207>
- World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1897-4>
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Pathways to Inclusive Growth*.



BIODATA PENULIS

Rahmat Hidayat, S.E., M.M. merupakan dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Tomakaka, Mamuju, Sulawesi Barat. Beliau menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi (S1) di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan menyelesaikannya pada tahun 2020. Setelah itu, beliau melanjutkan studi ke jenjang Magister Manajemen (S2) di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dan berhasil meraih gelar M.M. pada tahun 2024.

Sejak masa perkuliahan, Rahmat Hidayat aktif mengembangkan minat di bidang penulisan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Ia telah menulis berbagai artikel di media daring dan cetak, serta menghasilkan beberapa karya buku yang berkaitan dengan manajemen, dan keuangan. Selain itu, sejumlah hasil penelitiannya juga telah diterbitkan di jurnal nasional dan internasional terindeks, sebagai bagian dari kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen dan keuangan.

Sebagai akademisi, beliau memiliki perhatian khusus pada literasi keuangan, ekonomi syariah, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui kegiatan penelitian dan penulisan buku ajar, Rahmat Hidayat berkomitmen untuk menghadirkan pembelajaran yang relevan, aplikatif, dan mudah dipahami oleh mahasiswa serta masyarakat luas.

MANAJEMEN KEUANGAN, PEMAHAMAN TEKNOLOGI, DAN PERAN PEMERINTAH dalam Membentuk KINERJA UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama perekonomian Indonesia yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan semakin ketatnya persaingan global, UMKM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pengelolaan keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, hingga belum optimalnya dukungan pemerintah.

Monograf ini menyajikan pembahasan komprehensif mengenai bagaimana manajemen keuangan yang baik, pemahaman dan pemanfaatan teknologi, serta peran pemerintah yang efektif saling berinteraksi dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan keberlanjutan UMKM. Disajikan secara sistematis mulai dari konsep dasar hingga implementasi praktis yang relevan dengan kondisi UMKM di Indonesia.

Dilengkapi dengan model konseptual pengembangan UMKM melalui Model Inkubasi Bisnis Terintegrasi dan Model Digitalisasi UMKM Terintegrasi, monograf ini menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, pendamping UMKM, pengambil kebijakan, dan semua pihak yang peduli pada penguatan kapasitas UMKM di era ekonomi digital.



MANAJEMEN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan untuk keputusan yang lebih tepat



PEMAHAMAN TEKNOLOGI

Pemanfaatan teknologi digital untuk efisiensi dan inovasi



PERAN PEMERINTAH

Dukungan kebijakan, pembiayaan, pelatihan, dan infrastruktur



KINERJA UMKM

Peningkatan produktivitas, profitabilitas, dan daya saing usaha



KEBERLANJUTAN UMKM

Mewujudkan UMKM yang tangguh dan berdaya saing